

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pariwisata tumbuh menjadi industri besar atau sebagai leading sektor bagi banyak negara dan menjadi industri yang tumbuh paling cepat di dunia. Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan sektor lain yang selalu dilaksanakan secara berkelanjutan yang selalu bersinergi dengan berbagai komponen dan sektor pendukung lainnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Pasifik menunjukkan peluang yang luas bagi pengembangan pasar pariwisata untuk pengembangan pariwisata di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dll.¹ Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki potensi wisata yang besar berupa warisan budaya dan alam sebagai modal untuk pengembangan pariwisatanya. Saat ini di Indonesia sektor pariwisata menjadi salah satu bagian dari sektor industri yang mempunyai potensi dan peluang untuk dikembangkan. Hal tersebut dimulai ketika ada potensi yang tersembunyi dikenali kemudian diambil langkah-langkah untuk mengembangkannya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.772 pulau,² dengan berbagai ukuran, lima pulau besar yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Negara ini membentang di area seluas 1,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 104.000 km. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia. Terdiri dari pulau-pulau alami, keanekaragaman hayati yang eksotis, iklim tropis, dan keanekaragaman budaya menjadikannya tujuan wisata yang populer. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota.³

¹ I Made Suniastha Amerta, I Made Sara, dan Kompiang Bagiada, “*Sustainable tourism development*”, International Research Journal Of Management, IT & Social Sciences, Vol. 5 No. 2, 2018

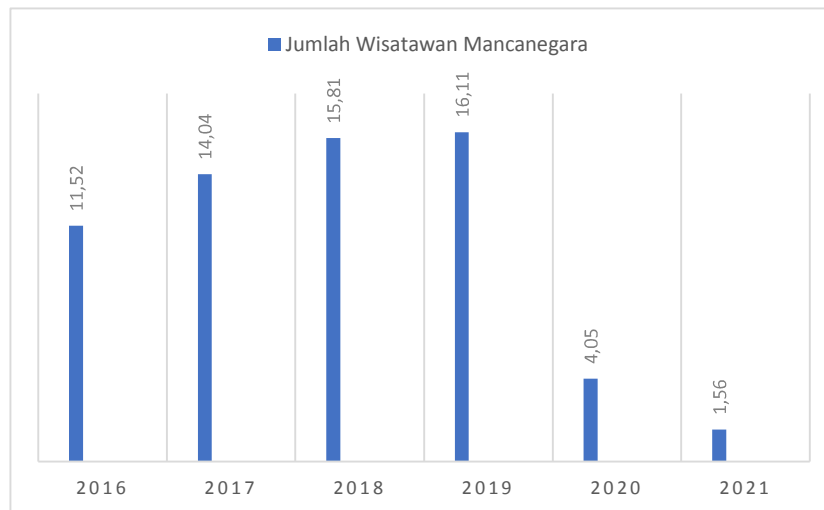
² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “*Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau Di Seluruh Indonesia*”, (<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/>, Diakses pada 9 Juli 2022)

³ *Ibid.*

Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2022 diproyeksikan lebih dari 275,77 juta jiwa. Dimana hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia yang dianggap sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang terbentang melintasi garis khatulistiwa. Kombinasi geografis dan demografis ini menyediakan berbagai macam destinasi alam dan budaya. Apalagi jumlah sumber daya manusia (SDM) yang besar serta fakta bahwa Indonesia saat ini berada dalam era bonus demografi dengan dua pertiga penduduknya berusia produktif, seharusnya menciptakan keunggulan di bidang pariwisata baik di tingkat regional maupun global.

Pariwisata merupakan sektor industri yang memiliki peluang dan pengaruh dalam mendukung perekonomian Indonesia. Terlihat dari minat wisatawan mancanegara yang masih banyak datang ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga minat untuk berkunjung tinggi.

Bagan 1.1 Kedatangan Wisatawan Mancanegara 2016 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingginya kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 – 2019, dalam kurun waktu empat tahun kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, dan pada tahun 2019 kunjungan mencapai hingga 16,11 juta, akan tetapi perpindahan dari tahun

2019 – 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang cukup drastis yakni sebesar 74,84 persen. Adanya penurunan yang sangat drastis disebabkan adanya pandemi Covid-19, yang membuat sejumlah negara mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan perlintasan bagi orang asing termasuk di Indonesia. Sehingga hal tersebut berimbas menyusutnya jumlah kunjungan wisata mancanegara semenjak tahun 2020, serta belum menunjukkan arah perbaikan sampai tahun 2021. Sepanjang tahun 2020, tercatat jumlah kunjungan wisata mancanegara cuma mencapai 4,05 juta kunjungan. Sedangkan tahun 2021, jumlah kunjungan wisata mancanegara hanya tercatat sebanyak 1,56 juta kunjungan, turun sebesar 61,57 persen dibanding dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara pada tahun 2020.⁴

Dalam menyikapi perubahan tersebut pemerintah terus melakukan upaya-upaya pengembangan pariwisata dengan melihat segmentasi pasar serta harus melakukan identifikasi mendalam baru pemerintah melakukan penyusunan perencanaan, hal tersebut dikarena sektor pariwisata memiliki *multi player effect* yang kuat, dimana dapat berdampak pada sektor lainnya sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penerimaan devisa, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga dapat digunakan untuk memperkenalkan identitas dan kebudayaan nasional. Bahkan pariwisata menjadi objek *reloance* yang tangguh adaptif di tengah pandemi Covid-19, karena menjadi sektor utama yang ‘ambruk’ di masa pandemi, namun juga dapat bangkit secara cepat karena tidak membutuhkan *cost* yang besar. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan sumber serta potensi pariwisata nasional. Bila dikelola dengan benar pariwisata dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berpotensi di bidangnya. Diperlukan sebuah potensi serta keunggulan yang harus digali kemudian dikemas dengan cara menarik dan dilakukan *branding* agar banyak

⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021”, (<https://www.bps.go.id/>, Diakses pada 10 Juli 2022)

khalayak yang mengetahui pariwisata tersebut baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Selain itu diperlukan pengambilan langkah-langkah dan peraturan-peraturan yang lebih terencana bersumber pada kebijaksanaan yang terpadu. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai dimaksud dalam pasal 2 yakni pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tepatnya pada pasal 4, dijelaskan mengenai tujuan kepariwisataan diantaranya, a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j) mempererat persahabatan antarbangsa (Republik Indonesia, 2009). Secara garis besar yang tertera dalam undang-undang kepariwisataan, sektor pariwisata diharapkan dapat berpengaruh bagi kemajuan suatu negara. Dalam pembangunan negara, sektor pariwisata memiliki peranan diantaranya segi ekonomis, segi sosial, dan segi kebudayaan, yang biasanya disebut dengan kata tiga segi. Dimana dalam segi ekonomis, sektor pariwisata dapat memperoleh usaha padat karya serta menciptakan tenaga kerja di sektor lain. Selanjutnya dalam segi sosial, sektor pariwisata berpengaruh terhadap pengembangan sikap warga yang berorientasi pada konsumsi; kejadian fenomena patologi sosial dan polarisasi populasi. Dan kemudian dalam segi kebudayaan, sektor pariwisata berpengaruh pada terjadinya proses akulturasi antara kebudayaan yang dimiliki warga lokal dengan kebudayaan yang dibawa para wisatawan.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 2

⁶ Ardi Suryawinata, “*Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi*”, Media Wisata, Vol. 2 No. 1, 2003

Diperlukan suatu usaha yang kondusif dalam memanfaatkan peluang pariwisata agar dapat menguntungkan serta menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, kemudian melakukan pengelolaan secara maksimal sehingga dapat menarik dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanaman modal, dapat dipastikan taraf hidup dan kesejahteraan warga dapat meningkat apabila disertai dengan tingginya aktivitas ekonomi sehingga dapat berdampak langsung dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Berbicara terkait dengan daerah, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dimana sepanjang dari bulan Januari sampai Mei 2022, Bandara Juanda Surabaya menjadi pintu bagi 6.123 wisatawan mancanegara. Apabila dibandingkan dengan perolehan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2021, lonjakannya mencapai 88,71 persen dengan jumlah riil sebesar 691 wisatawan mancanegara. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) Umar Sjaifudin mengatakan pandemi Covid-19 diharapkan segera berakhir agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatim, pada bulan-bulan berikutnya mengalami peningkatan. Secara umum, pola kedatangan wisatawan mancanegara ke Jatim, pada bulan April selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang naik seiring dengan berangsur pulihnya kondisi Covid-19.⁷ Melihat perubahan ke arah positif, diharapkan sektor pariwisata dapat segera pulih pasca pandemi Covid-19, sebab saat ini pemerintah sedang gencar mengejar pembangunan berbagai fasilitas penunjang pariwisata baik akomodasi dan transportasi setelah vakum beberapa saat akibat pandemi Covid-19. Adanya pembangunan berbagai fasilitas diharapkan dapat menopang suatu daerah untuk terus meningkatkan suatu produk unggulan atau potensi yang dimiliki yang memadai untuk berkembang menjadi sebuah pariwisata yang mampu bersaing dengan berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 - 2020

⁷ Lukman Hakim, “*Pandemi COVID-19 Mereda, Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jatim Naik*”, (<https://daerah.sindonews.com>, Diakses pada 15 Juli 2022)

mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2016 – 2018 kunjungan wisman yang masuk ke Jawa Timur menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, namun pada tahun 2019 – 2020 terjadi penurunan kunjungan wisman ke Jawa Timur. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Jawa Timur
2016-2020**

Tahun	Jumlah (Kunjungan)	Persentase
2016	220.570	-
2017	239.411	8,54 %
2018	320.529	34,90 %
2019	243.899	24,48 %
2020	35.035	(-) 85,63 %

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (2020)

Berdasarkan data diatas, jumlah wisatawan mancanegara di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 220.570 kunjungan, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 8,54 persen atau meningkat menjadi 239.411 kunjungan, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 34,90 persen atau meningkat menjadi 320.529 kunjungan. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 24,48 persen atau menurun menjadi 243.899 kunjungan. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sangat drastis yakni sebesar 85,63 persen atau menurun menjadi 35.053 kunjungan.

Sementara itu, kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2016 - 2020 juga mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2016-2019 kunjungan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.2 Kunjungan Wisatawan Domestik di Jawa Timur**2016-2020**

Tahun	Jumlah (Kunjungan)	Persentase
2016	58.068.493	-
2017	62.623.535	13,01 %
2018	70.935.415	8,09 %
2019	82.561.561	16,38 %
2020	29.703.992	(-) 64,02 %

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan domestik di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 58.068.493 kunjungan, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 13,01 persen atau meningkat menjadi 65.623.535 kunjungan, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 8,09 persen atau meningkat menjadi 70.935.415 kunjungan. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 16,38 persen atau meningkat menjadi 82.561.561 kunjungan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sangat drastis yakni sebesar 64,02 persen atau menurun menjadi 29.703.992 kunjungan. Tingginya antusiasme wisatawan untuk datang ke Jawa Timur, baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang di kunjungi.

Provinsi Jawa Timur juga memiliki banyak potensi pariwisata yang tidak kalah dengan provinsi lain di Indonesia. Terdapat beberapa diantaranya wisata alam baik pantai maupun gunung, kawasan deretan pantai yang berada di wilayah malang selatan, serta kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama nasional. Selain obyek wisat alam, terdapat juga wisata dengan tema Edu Wisata seperti Taman Safari di Pasuruan, Jatim Park di Batu, dan Wisata Bahari Lamongan. Berbagai potensi yang dimiliki Jawa Timur tersebut menjadi magnet yang dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Provinsi Jawa Timur. Adanya kunjungan pariwisata yang cukup besar di Jawa Timur, diharapkan pemerintah daerah untuk senantiasa mempertahankan dan

menambahkan berbagai sarana dan prasarana publik agar dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang dapat berdampak pada percepatan perkembangan ekonomi di daerah. Diperlukan berbagai pihak dalam pembangunan fasilitas penunjang karena hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi suatu pemerintah daerah.

Dalam rangka pembangunan melalui sektor pariwisata, Provinsi Jawa Timur memiliki kawasan Gerbangkertosusila yang menunjang pembangunan di Jawa Timur. Kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu satuan wilayah pembangunan (SWP) yang berada di Provinsi Jawa Timur. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Glaeser, dkk (2003) kawasan ini memiliki sektor unggulan industri serta memiliki kedekatan lokasi ⁸. Gerbangkertosusila terdiri dari: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, yang menjadikan Surabaya (daerah nodal) menjadi pusat kegiatan ekonominya ⁹.

**Tabel 1.3 Jumlah Pengunjung Wisatawan Gerbangkertosusila
Tahun 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung
1.	Surabaya	10.681.318
2.	Bangkalan	961.189
3.	Mojokerto	832.330
4.	Gresik	1.021.963
5.	Lamongan	1.028.889
6.	Sidoarjo	887.000

Sumber: diolah peneliti (2022)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Kabupaten Gresik memiliki jumlah pengunjung wisatawan tertinggi setelah Surabaya dan Lamongan, seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

⁸ Glaeser, Edward L, dan Matthew E. Kahn. 2003. *Sprawl and Urban Growth*. United State: National Bureau of Economic Research

⁹ Fitriyah, Lailatul dan Lucky Rachmawati. 2012. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Surabaya: UNESA

Jawa Timur yang memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat digali lebih dalam. Dengan keadaan dan letak geografis yang berada pada dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagai salah satu wilayah pengembang Provinsi Jawa Timur kabupaten Gresik memiliki segudang potensi wisata yang menarik untuk di kunjungi mulai dari wisata Gresik daratan hingga wisata Pulau Bawean. Banyaknya akses yang dimiliki Kabupaten Gresik menjadi nilai tambah bagi wisatawan untuk datang ke Gresik. Para wisatawan dapat memasuki Kabupaten Gresik yang terletak di wilayah barat laut Kota Surabaya melalui gerbang jalan tol romokalisari, gerbang jalan tol Manyar, gerbang jalan tol Kebomas, gerbang jalan tol KLBM. Kemudian terdapat beberapa terminal untuk akses transportasi umum, diantaranya terminal Bunder, terminal Giri, terminal Lumpur, dan bisa diakses pula melalui pelabuhan Gresik.

Selain kemudahan akses jalan, terdapat hal lain yang menjadi perhitungan para wisatawan yakni akomodasi berupa tempat penginapan seperti hotel dan losmen, serta tempat untuk makan seperti restoran yang terakomodasi dengan baik. Sejumlah upaya pendukung pariwisata telah tersedia di Kabupaten Gresik guna menjangkau wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara termasuk Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terkait pengembangan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025. Dimana pada pasal 1 dijelaskan terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berikutnya disingkat RIPPADA merupakan rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan serta pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, aspek penunjang serta pengembangan kepariwisataan secara bersinambung dan berwawasan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 - 2021

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 - 2025

mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2016 – 2019 kunjungan wisman yang masuk ke Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 – 2021 terjadi penurunan kunjungan wisman ke Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.4 Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Gresik

2016-2021		
Tahun	Jumlah (Kunjungan)	Persentase
2016	4.874	-
2017	9.736	49,94%
2018	14.625	50,22 %
2019	46.915	68,34 %
2020	4.360	(-) 90,56 %
2021	10	(-) 99,77 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik (2022)

Berdasarkan data diatas, jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebesar 4.874 kunjungan, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 49,94 persen atau meningkat menjadi 9.736 kunjungan, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 50,22 persen atau meningkat menjadi 14.625 kunjungan. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 68,34 persen atau meningkat menjadi 46.195 kunjungan. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 90,56 persen atau menurun menjadi 4.360 kunjungan. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sangat drastis yakni sebesar 99,77 persen atau menurun menjadi 10 kunjungan.

Sementara itu, kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2016 - 2021 juga mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2016 – 2019 kunjungan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.5 Kunjungan Wisatawan Domestik di Kabupaten Gresik
2016 - 2021**

Tahun	Jumlah (Kunjungan)	Persentase
2016	3.258.126	-
2017	3.537.997	8,59 %
2018	3.553.920	0,45 %
2019	4.570.483	28,60 %
2020	2.029.540	(-) 55,59 %
2021	1.021.953	(-) 49,65 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik (2022)

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan domestik di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebesar 3.258.126 kunjungan, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 8,59 persen atau meningkat menjadi 3.537.997 kunjungan, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,45 persen atau meningkat menjadi 3.553.920 kunjungan. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 28,60 persen atau meningkat menjadi 4.570.483 kunjungan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sangat drastis yakni sebesar 55,59 persen atau menurun menjadi 2.029.540 kunjungan. Dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 49,65 persen atau menurun menjadi 1.021.953 kunjungan. Dapat diketahui bahwa menurunnya jumlah pengunjung pada dua tahun terakhir ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga dapat dilihat dari tabel sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata lokal, dimana sangat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik.

Wisata religi di Kabupaten Gresik menjadi salah satu destinasi yang menarik pengunjung baik domestik dan wisatawan mancanegara. Budaya ziarah selalu terjaga dan terus berkembang di kalangan warga Kabupaten Gresik, terutama ziarah pada makam-makam tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama

islam. Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terkenal sebagai kota religi atau dijuluki sebagai ‘Kota Wali’. Dimana hal tersebut dikarenakan Kabupaten Gresik menjadi satu-satunya daerah dimana terdapat dua orang wali dimakamkan diantaranya Makam Sunan Giri dan Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. sehingga keberadaan dua makam wali tersebut menjadi daya tarik wisata religi dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengunjungi Kabupaten Gresik. Kedua makam Wali Songo tersebut selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama pada saat libur sekolah dan hari tertentu. Selain dua wisata religi tersebut, terdapat pula beberapa makam peniar agama islam lainnya seperti Siti Fatimah Binti Maimun, Makam Pusponogoro, Makam Nyai Ageng Pinatih, dan sebagainya. Dilihat dari terus bermunculannya wisatawan hal tersebut menjadikan wisata religi menjadi salah satu sektor wisata yang berpotensi di Kabupaten Gresik.

Tabel 1.6 Pengunjung Obyek dan Daya Tarik Wisata Religi di Kabupaten Gresik 2019-2021

No	Obyek Wisata Religi	2019		2020		2021	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Makam Malik Ibrahim	471	1.503.450	131	435.269		411.362
2.	Makam Sunan Giri	-	2.096.813	-	590.100		580.733
3.	Makam Nyai Ageng Pinatih	79	74.234	-	26.055		12.166
4.	Makam Siti Fatimah Binti Maimun	79	34.175	12	16.575		30.439
5.	Bukit Surowiti	-	10.150	-	6.231		6.373
6.	Makam Sunan Prapen	41	30.370	-	9.428		14.395
7.	Makam Raden Santri	-	21.398	-	8.235		5.118

8.	Giri Kedaton	42	34.609	-	14.177		16.478
9.	Lasem	-	3.186	-	1.005		-
10.	Makam Dewi Sekardadu	-	2.341	-	707		2.953
11.	Makam Puspongoro	-	21.626	-	12.461		10.331
12.	Putri Cempo	-	7.271	-	3.433		2.268
13.	Makam Maulana Umar Masud	1.597	4.448	164	544		1.304
14.	Makam Pangeran Purbonegoro	1.022	2.514	26	527		763
15.	Makam Cokrokusumo	309	1.193	69	162		366
16.	Makam Jujuk Campa	159	956	44	160		115
17.	Makam Jujuk Tampo	1.075	3.256	131	247		184
18.	Kuburan Panjang	2.116	18.364	236	601		803
19.	Makam Waliyah Zainab	3.389	23.218	35	977		1.494
TOTAL		3.903.951		1.127.742		1.097.645	

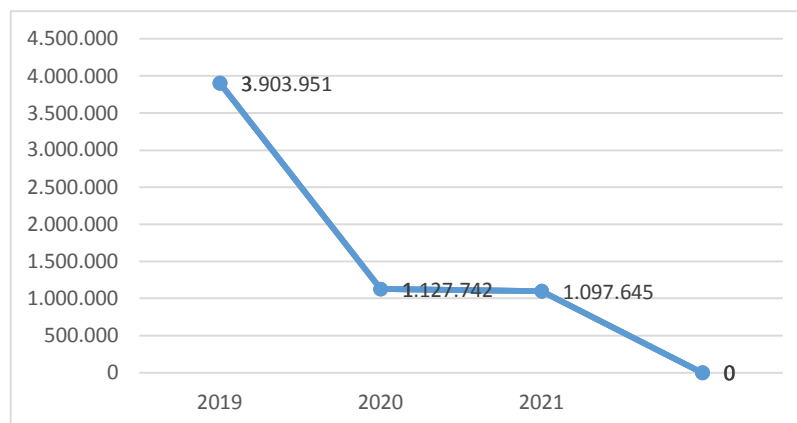
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pariwisata sektor religi di Kabupaten Gresik memiliki potensi yang memadai karena pariwisata tersebut sudah eksis sejak dahulu, pada tahun 2019 jumlah pengunjung wisata religi mencapai

3.903.951 wisatawan namun pada tahun 2020 menurun sebesar 71,11 persen atau turun menjadi 1.127.742 wisatawan dan kemudian pada tahun 2021 masih terjadi penurunan hanya sebesar 2,67 persen atau menurun menjadi 1.097.645 wisatawan. Adanya perubahan jumlah wisatawan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga para wisatawan baik mancanegara maupun domestik menjadi dibatasi dalam berpariwisata dan berdampak pada sektor pariwisata tersebut.

Apabila dilihat secara keseluruhan pengunjung wisata religi pada tahun 2019, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, sektor wisata religi berkontribusi sebesar 84,55 persen dari keseluruhan jumlah pengunjung pada tahun 2019 dimana jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Gresik sebesar 4.617.398 dan pengunjung wisata religi sebesar 3.903.951. Kemudian pada tahun 2020, sektor wisata religi berkontribusi sebesar 55,45 persen dari keseluruhan jumlah pengunjung pada tahun 2019 dimana jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Gresik sebesar 2.033.900 dan pengunjung wisata religi sebesar 1.127.742. Dan pada tahun 2021, hampir seluruh pengunjung pariwisata di Kabupaten Gresik berkunjung di sektor religi dimana jumlah pengunjung wisata religi sebesar 1.097.645 sedangkan pengunjung pariwisata di Kabupaten Gresik sebesar 1.121.963 pengunjung.

Bagan 1.2 Pengunjung Obyek dan Daya Tarik Wisata Religi di Kabupaten Gresik 2019-2021



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik (2022)

Dapat dilihat dari bagan diatas terkait kunjungan wisatawan ke wisata religi di Kabupaten Gresik mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2019 masih banyak pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut yakni sebesar 3.903.951 pengunjung, akan tetapi pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan sebesar 71,11 persen atau menurun menjadi 1.127.742 pengunjung, dan pada tahun 2021 juga terjadi penurunan sebesar 2,67 persen atau menurun menjadi 1.097.645 pengunjung. Seperti yang diketahui penurunan jumlah pengunjung wisatawan ke wisata religi disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sudah mulai melandai dan secara perlahan sektor pariwisata telah dibuka kembali, akan tetapi pada wisata religi di Kabupaten Gresik belum menunjukkan perubahan yang positif dikarenakan terdapat kemungkinan para wisatawan datang berkunjung ke wisata lain saat mengunjungi Kabupaten Gresik.

Pada dasarnya Kabupaten Gresik memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan selain wisata religi. Secara umum wilayah di Kabupaten Gresik dibagi menjadi dua bagian yakni Gresik daratan dan Pulau Bawean. Di Pulau Bawean banyak ditemui destinasi alam yang menarik wisatawan diantaranya Pantai Mayangkara, Pantai Labuhan dan Danau Kastoba yang terletak di Desa Paromaan Kecamatan Tambak. Dalam kaitannya dengan pariwisata, Kabupaten Gresik wajib menggali serta memanfaatkan potensi ataupun karakter daerahnya sehingga dapat meningkatkan segmen wisata yang cocok dengan kearifan lokal. Dalam sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata alam yang dapat menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dan menjawab kebutuhan pariwisata para wisatawan, berikut terdapat beberapa wisata alam yang ada di Kabupaten Gresik.

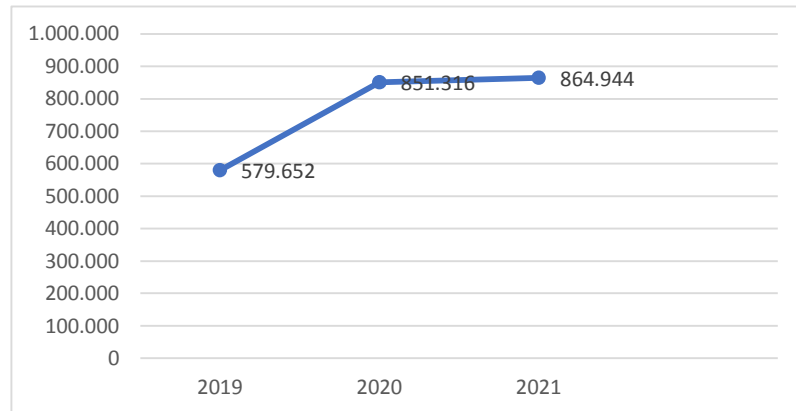
Tabel 1.7 Pengunjung Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Gresik 2019 - 2021

No.	Obyek Wisata Alam	2019		2020		2021	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Pantai Dalegan	-	195.896	-	326.078	-	230.028
2.	Air Panas Sawah Mulya	1.998	12.430	107	2.290		1.841
3.	Air Panas Sungai Rujing	4	468	4	58		171
4.	Pulau Selayar	552	3.484	151	751		1.851
5.	Pantai Terosan	872	5.611	14	285		180
6.	Pulau Noko	1.013	4.092	79	265		416
7.	Pulau Gili	2.745	18.495	255	859		1.689
8.	Pulau Noko Gili	3.426	20.736	389	1.078		1.755
9.	Air Terjun Laccar	202	2.831	155	460		322
10.	Air Terjun Kudduk Kudduk	86	2.170	-	130		240
11.	Pantai Ria	172	2.680	-	85		361
12.	Pulau Gili Barat	224	2.754	23	180		1.706
13.	Pulau Cina	1.275	5.428	174	564		870
14.	Air Terjun Teluk Jati Dawang	235	3.378	2	269		807
15.	Pasir Putih Sukaoneng	124	947	20	276		804
16.	Pantai Labuhan	1.655	14.888	197	947		1.741
17.	Pantai Mayangkara Kepuh	241	3.943	10	200		420
18.	Air Panas Kepuh	2.489	7.060	136	485		227
19.	Danau Kastoba	2.843	7.225	188	639		1.292

20.	Wisata Banyu Biru Lowayu	-	20.779	-	3.763		12.884
21.	Wisata Selo Tirta Giri (SETIGI)	6	36.865	-	241.262		167.801
22.	Wisata Alam Gosari	-	56.016	-	98.790		152.382
23.	Mangrove Hijau Daun	6.212	73.762	504	6.298		1.972
24.	Pantai Kerrong Mombhul	5.514	46.006	230	1.312		77
25.	Muara Bengawan Solo	-	-	-	1.458		447
26.	Wisata Lontar Sewu	-	-	-	159.894		282.660
TOTAL			579.652		851.316		864.944

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik (2022)

Bagan 1.3 Pengunjung Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Gresik 2019 - 2021



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik (2022)

Dapat dilihat dari bagan diatas, jumlah pengunjung wisata alam di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif dimana per tahun selalu mengalami peningkatan jumlah pengunjung dan seakan-akan tidak terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung wisata alam mencapai 579.652, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 46,87 persen atau meningkat menjadi 851.316 pengunjung, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1,60 persen atau meningkat menjadi 864.944 pengunjung. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata alam dapat menjadi alternatif dalam perekonomian selain wisata religi di Kabupaten Gresik. Sehingga diperlukan peran *stakeholder* yang mendukung penuh pengembangan wisata alam di Kabupaten Gresik.

Banyaknya destinasi pariwisata di Kabupaten Gresik mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya agar pariwisata di Gresik menjadi lebih eksis setelah usainya pandemi Covid-19 sehingga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik, adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni diantaranya melakukan *branding* destinasi wisata yang ada di Gresik melalui berbagai media sosial, salah satunya *instagram*. Dalam akun media sosial *instagram @gresiktourism*, pengelola dari media sosial tersebut aktif mempromosikan wisata – wisata yang ada di Kabupaten Gresik yang dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Kemudian terdapat inovasi terbaru dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni membuat sebuah aplikasi dengan nama SIPATU-GT yakni sebuah aplikasi yang terdapat pada *smartphone* berbasis *android* yang berfungsi sebagai pemandu wisata. Aplikasi SIPATU GT (Sistem Informasi Pariwisata Terpadu - *Gresik Tourism*) adalah aplikasi terbaru yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, yang memberikan fitur lengkap mengenai destinasi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Gresik dan disertai jasa pendukung seperti rekomendasi tempat penginapan atau hotel, informasi terkait kuliner, cinderamata khas Gresik, biro perjalanan, dan sebagainya. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik menyediakan *Gresik Tourist Information Center* (GTIC) yang dapat ditemui

pada beberapa titik di Kabupaten Gresik. Salah satu informasi yang bisa didapatkan melalui GTIC tersebut ialah mengenai acara-acara tahunan yang ada di Kabupaten Gresik.

Dapat dilihat dari tabel 1.7 di atas, destinasi pariwisata di Kabupaten Gresik memiliki banyak potensi dalam berbagai jenis pariwisata selain terkenal dengan wisata religinya, Kabupaten Gresik juga kaya akan wisata alam khususnya di wilayah Pulau Bawean, dan pada dasarnya masih banyak potensi wisata alam yang dapat di gali dari Kabupaten Gresik khususnya pada wilayah Gresik daratan. Tekait hal tersebut, pengembangan pariwisata di Kabupaten Gresik menjadi sangat penting dikarenakan saat ini sektor pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan pembangunan daerah melalui usaha ekonomi daerah. Selain itu, secara tidak langsung melalui sektor pariwisata Kabupaten Gresik akan lebih dikenal oleh warga lebih luas.

Pengembangan Desa wisata saat ini menjadi isu sentral dalam penguatan peran Desa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Dalam UU Desa diatur bahwa ‘Desa harus mengembangkan segala potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya’. Dengan demikian Desa yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata dapat mengembangkan potensinya dengan dukungan anggaran dari dana Desa Menyikapi hal tersebut Kabupaten Gresik juga mendukung program pemerintah tersebut, dimana hal tersebut dibuktikan dengan mulai banyaknya Desa wisata yang berkembang di tiap daerah. Berikut terdapat beberapa Desa wisata yang berada di wilayah Gresik daratan yang mampu memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki diantaranya, Desa Wisata Lontar Sewu . Desa Wisata Lontar Sewu menjadi salah satu Desa Wisata yang masuk kategori maju oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan potensi alam berupa pohon lontar yang tumbuh di Desa tersebut, selanjutnya terdapat Desa Wisata Pangkahkulon yang memanfaatkan potensi alam seperti tambak dan ekosistem mangrove, kemudian Desa Wisata Dalegan yang memiliki potensi alam pantai, selanjutnya terdapat Desa Wisata Kemangi yang memiliki potensi telaga kemudian disertai pembangunan

seperti spot untuk ber-swa foto yang ikonik dan *instagramable*, dan yang terakhir ialah Desa Wisata Sekapuk yang memanfaatkan potensi bekas galian kapur dan dijadikan tempat wisata yang menjual nuansa alam buatan dikarenakan banyak tebing menjulang sisa dari galian tambang.

Desa wisata merupakan salah satu program kementerian Desa , pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi Desa wisata berkelanjutan.¹¹ Desa wisata berkelanjutan merupakan salah satu target pemerintah dalam upaya menggali potensi Desa , memberdayakan ekonomi warga setempat dan melestarikan lingkungan Desa . Desa wisata kini menjadi wujud implementasi pembangunan pariwisata berbasis warga dan berkelanjutan serta banyak digunakan sebagai peluang untuk perbaikan standar hidup warga. Dengan cara memutus mata rantai kemiskinan, pengembangan Desa wisata diharapkan mampu mengeluarkan suatu Desa atau daerah dari ketidakberdayaan, kemiskinan, dan memperoleh kekuatan sehingga menjadi suatu daerah yang mandiri.¹² Sebagaimana ditunjukkan oleh keterlibatan warga yang menjadi salah satu usaha penerapan wisata berkelanjutan. Partisipasi aktif warga desa pada setiap tahapan kegiatan diharapkan dapat menambah pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian warga sekitar. Selain itu, dampak terhadap kesejahteraan warga dapat dicapai secara berkelanjutan. Mengenai konsep pengembangan Desa wisata, pengembangan Desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan pada cara mengembangkan atau mempromosikan Desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan Desa wisata diartikan sebagai upaya melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengembangan daerah Desa wisata dapat dikaitkan dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengharuskan setiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki agar dapat menambah pendapatan daerah. Hal tersebut tidak lain

¹¹ Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

¹² Tukiman, Ertien Rining N, dan Andre Yusuf Trsina, "*Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon dengan Bahan Dasar dari Jantung Pisang di Desa Dompyong Kabupaten Trenggalek*", Journal of Public Sector Innovations, Vol. 4 No.1, 2019

dikarenakan dalam jangka panjang pengembangan Desa wisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan warga desa .¹³

Terdapat salah satu Desa wisata yang berpotensi dan menarik pengunjung lokal di Kabupaten Gresik pada awal tahun 2020 yakni Desa Wisata Lontar Sewu yang berada di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Desa Wisata Lontar Sewu merupakan objek wisata yang dikembangkan bekerjasama dengan Desa Hendrosari dengan kementerian Desa , program percontohan inkubasi inovasi Desa pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) tahun 2019. Desa Hendrosari merupakan salah satu Desa wisata yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.408 jiwa. Desa ini dikenal dengan adanya obyek wisata Lontar Sewu yang ditanami pohon lontar sebagai salah satu produk unggulannya dan memiliki luas lahan sebesar 90 ha. Berdasarkan profil Desa Hendrosari, sedikitnya terdapat 718 penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan kata lain, masih banyak penduduk yang tidak produktif meskipun pada dasarnya warga desa telah mencapai usia kerja. Sebelumnya Desa Hendrosari diketahui oleh warga dengan Desa stigma yang kurang baik, dimana desa tersebut mendapat julukan sebagai ‘Desa yang memabukkan’. Perihal ini disebabkan desa tersebut menjadi penghasil minuman tuak yang merupakan minuman dari hasil fermentasi dari air nira buah yang berasal dari pohon lontar. Melihat hal tersebut pemerintah desa beserta warga desa Hendrosari memiliki keinginan untuk melenyapkan citra kurang baik tersebut dengan memanfaatkan potensi yang ada di pohon lontar untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Sehingga seperti yang diketahui hingga saat ini, Desa Wisata Lontar Sewu memanfaatkan potensi alam yang ada pada desa tersebut yakni berupa pohon lontar yang jarang ditemui di desa lainnya, namun ribuan pohon lontar ini tumbuh dengan subur di area persawahan desa tersebut, bahkan menjadi produk unggulan desa , dimana buah dari pohon lontar dapat diolah menjadi legen dan minuman fermentasi (tuak).

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada mulanya Desa Wisata Lontar Sewu pertama kali dimunculkan karena adanya Program Hibah Bina Desa (PHBD) yang merupakan bentuk hasil dari pengabdian mahasiswa kepada warga. Dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Surabaya (Unesa) yang mengajukan proposal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). PHBD merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang ditawarkan kepada organisasi mahasiswa pada setiap tahun yang bertujuan untuk memberi peluang bagi mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi negara. Mahasiswa mempunyai tujuan selaku pengabdian kepada warga dengan menunjang meningkatkan taraf ekonomi serta ilmu pengetahuannya, meningkatkan empati serta kepedulian mahasiswa pada lingkungan, mempraktikkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam regu kerja yang bersifat interdisipliner, serta mengedepankan nilai karakter, keuletan, etos kerja serta tanggung jawab dan kepribadian bangsa yang bersumber pada Pancasila.¹⁴

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa Unesa membuahkan hasil yang positif, dimana pihak Kemendikbudristek menyetujui proposal tersebut dan memberikan bantuan sebesar Rp.40.000.000 juta. Dengan adanya dana tersebut, tim PHBD Unesa dan pihak pemerintah melakukan kerjasama terkait pengelolaan Desa wisata. Dimana pada awalnya tim PHBD Unesa mengusulkan ekonomi kreatif yang dapat mensejahterakan Desa dengan konsep sentra kreatif Desa, namun pihak Desa ingin memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Hendrosari seperti waduk beserta kekayaan alam Desa berupa pohon siwalan. Kemudian, arahan tersebut disetujui dan tim PHBD Unesa langsung mengonsep obyek wisata tersebut dan diberi nama Edu Wisata Pelangi Siwalan dan Waduk Putri Sari. Sejalan dengan tujuan dari PHBD yakni mensejahterakan warga diharapkan setelah adanya kegiatan ini,

¹⁴ (<https://www.unesa.ac.id/phbd-siap-bergerak-dalam-pertumbuhan-ekonomi-daerah>, Diakses pada 29 Juli 2022)

warga desa Hendrosari diharapkan untuk menjaga dan mengelola obyek wisata secara maksimal agar dapat mencapai kesejahteraan bersama.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, Desa wisata yang berada di Hendrosari berhasil mendapatkan penghargaan dalam lomba yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terkait dengan keberhasilannya dalam mengubah potensi alam yang dimiliki dan berhasil menjadi Juara ke-3 dalam lomba tersebut.¹⁶ Sehingga Desa wisata yang ada di Hendrosari berhasil dilirik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, kemudian Pemkab Gresik mengajukan proposal terkait keberhasilan Desa dalam mengembangkan potensi alam yang dimiliki, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Hendrosari dikarenakan terdapat potensi alam yakni pohon lontar. Pemkab Gresik menyetujui proposal dengan judul Edu Wisata Lontar Sewu dikarenakan pada awalnya dana yang diperoleh akan dijadikan museum lontar sewu sesuai dengan usulan dari Dinas Pemberdayaan Warga desa (PMD), yang bertujuan untuk melestarikan pohon lontar dengan diorama yang dimiliki Desa Hendrosari. Kemudian proposal tersebut disetujui dan Desa Hendrosari terpilih untuk menjalankan program dari Kemendes PDTT pada September 2019 melalui Program Percontohan Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Namun, terdapat beberapa perubahan yakni terkait wisata yang dikembangkan, dimana pihak Kemendes PDTT meminta untuk mengembangkan usaha cafe beserta sarana bermain agar lebih sesuai dengan trend pariwisata pada saat itu, dengan tujuan wisata tersebut dapat bertahan lama dan berkelanjutan.

Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa -Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) lahir berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Inovasi Desa. Program PIID-PEL merupakan program yang bergerak dalam

¹⁵ (<https://www.unesa.ac.id/lakukan-pengabdian-mahasiswa-unesa-olah-aset-wisata-Desa-hendrosari>, diakses pada 29 Juli 2022)

¹⁶ Rani Wahyuningsih dan Galih Wahyu Pradana, “Pemberdayaan Warga desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu”, Publika, Vol. 9 No. 2, 2021

pengembangan produk unggulan Desa dan disertai kontribusi dari berbagai sektor seperti BUMDesa, kelompok usaha ekonomi warga desa, dan pelaku usaha yang diterapkan pada sejumlah Desa dengan potensi Desa yang layak dikembangkan. Secara umum program PIID-PEL bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi dan jaringan pasar dari kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi warga peDesa an melalui "Kemitraan". Adapun tujuan khusus program PIID-PEL mencakup penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi Desa, termasuk koperasi dan BUMDes, untuk memperkuat rantai komoditas unggulan Desa; meningkatkan akses ke teknologi produksi dan pasca panen, keuangan, input produksi dan pasar; memperkuat partisipasi anggota warga miskin, kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya; penguatan prakarsa dan partisipasi warga desa dalam pembangunan ekonomi Desa; serta melestarikan dan mengembangkan inovasi teknologi lokal berbasis kearifan lokal. Maka dari itu, program PIID-PEL diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan agar dapat mengurangi kemiskinan di peDesa an.¹⁷ Pada dasarnya setiap Desa dapat mengajukan beberapa kali proposal tidak ada batasan untuk mendapatkan dana dari program PIID-PEL, namun pendapatan dana tergantung seleksi oleh Kemendes PDTT dan pengajuan jumlah besaran dana berdasarkan nilai potensi yang dimiliki masing-masing Desa.

Desa Hendrosari menjadi salah satu Desa di Kabupaten Gresik yang terpilih mendapatkan bantuan dana dari Program PIID-PEL dikarenakan memiliki potensi alam yang hanya bisa ditemukan di Desa Hendrosari yakni keberadaan pohon lontar yang tumbuh subur di Desa tersebut. Kurang lebih terdapat sebanyak 3600 pohon lontar tumbuh subur di Desa Hendrosari sehingga mendapat julukan Lontar Sewu. Terkait dengan Program PIID-PEL pada Desa Hendrosari, Kemendes PDTT mengucurkan dana mencapai Rp. 1,3 miliar. Kemudian dana tersebut dikembangkan dengan cara melalui kerjasama antara Kemendes PDTT dan Desa Hendrosari melalui BUMDes. Selanjutnya objek wisata yang dikenal dengan nama

¹⁷ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Inovasi Desa

Edu Wisata Lontar Sewu diresmikan oleh Mendes PDTT Abdul Halim pada 9 Februari 2020. Desa Wisata Lontar Sewu menggabungkan keindahan alam dengan wisata buatan yang dapat memanjakan para wisatawan, didalam Lontar Sewu terdapat sarana bermain dan belajar bagi anak, diantaranya taman bermain anak, taman bunga, taman kelinci, jembatan penyeberangan, gardu pandang, wahana permainan air sepeda perahu, *flying fox*, dan sebagainya. Tidak hanya sarana bermain, edu wisata lontar sewu juga menyediakan spot foto yang *instagramable* dengan latar belakang keindahan alam dari pohon lontar yang menjulang tinggi dan tertata rapi. Melalui Desa Wisata Lontar Sewu pengunjung tidak hanya disuguhi dengan keindahan serta berbagai sarana bermain didalamnya, namun pengunjung diharapkan mendapatkan suatu nilai-nilai edukasi dan pengalaman setelah mengunjungi obyek wisata tersebut.

BUMDes Hendrosari melakukan pengelolaan Desa Wisata Lontar Sewu melalui pemberdayaan warga sekitar yang bertujuan untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan keberadaan tempat wisata tersebut. Dengan adanya wisata lontar sewu, tahun 2021 BUMDes Hendrosari menghasilkan PAD sebesar 1,1 miliar, sebelum ada BUMDes hanya mendapatkan hasil dari pengelolaan air dari embung dengan jumlah pendapatan hanya sebesar 10 – 15 juta per tahun. Dengan adanya implemementasi program PIID-PEL di Desa Wisata Lontar Sewu , keberadaan program tersebut dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan jumlah warga desa yang bekerja secara langsung. Seperti yang diketahui bahwa dengan keberadaan Desa Wisata Lontar Sewu mampu menyumbang PAD Hendrosari mencapai 1,1 milyar dibandingkan deDimana terdapat 103 warga desa yang memiliki partisipasi dalam mengelola Desa Wisata Lontar Sewu , yang sebelumnya hanya menyerap 35 orang saja namun seiring dengan perkembangan Desa wisata berhasil menyerap tenaga kerja menjadi 111 orang dengan rentang usia 16 – 50 tahun, dengan tingkat pendapatan Rp. 1,8 – 3 juta per bulan ¹⁸. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dimana di Desa Hendrosari

¹⁸ Wawancara langsung dengan tim kreatif dan marketing Desa Wisata Lontar Sewu , Arif Noveri pada 1 Agustus 2022.

masih banyak warga yang tidak bekerja walaupun sudah memasuki usia produktif, dengan adanya program PIID-PEL yang dikembangkan melalui Desa Wisata Lontar Sewu, banyak warga desa yang berasal dari keluarga miskin yang belum memiliki pekerjaan atau pendapatan saat ini memiliki pekerjaan yakni sebagai pengelola Desa Wisata Lontar Sewu. Selain itu, petani siwalan juga ikut diuntungkan setelah adanya Desa Wisata Lontar Sewu, dimana terdapat 119 petani yang pendapatannya meningkat sebesar 2-3x dari penghasilan sebelumnya yakni sebesar Rp. 100 ribu/hari meningkat menjadi Rp. 300/hari yang berasal dari hasil peneualan legen ke BUMDesa terkait. Kemudian, dengan adanya Desa Wisata Lontar Sewu dapat meningkatkan produktivitas masyarakat setempat dalam kegiatan wirausaha yang diwujudkan melalui UKM yang berjualan disekitar area wisata dan saat ini terdapat 103 UKM yang bergerak. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari berbagai aspek, dapat berdampak pula pada jumlah keluarga miskin di Desa Hendrosari, dimana sebelumnya terdapat 114 keluarga miskin berkurang menjadi 88 keluarga miskin.¹⁹ Dalam jangka panjang, jumlah keluarga miskin akan mengalami penurunan seiring dengan perkembangan Desa wisata. Dapat dilihat dari segi jumlah pengunjung Desa Wisata Lontar Sewu menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Dimana pada awal tahun 2022 jumlah pengunjung sangat tinggi, akan tetapi pada bulan berikutnya mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

¹⁹ Eny Nur Muchlis, “*INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM PILOT INKUBASI DESA -PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PIID-PEL) (Studi Kasus Wahana Eduwisata Lontar Sewu Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)*”, Jurnal Inovasi Sektor Publik, Vol. 1 No. 1, 2021

Tabel 1.8 Jumlah Pengunjung Desa Wisata Lontar Sewu Tahun 2022

Bulan	Jumlah (pengunjung)	Persentase	%
Januari	62.519	-	26,27 %
Februari	25.767	(-) 58,79 %	10,83 %
Maret	28.807	11,80 %	12,11 %
April	8.116	(-) 71,83 %	3,41 %
Mei	52.258	84,47 %	21,96 %
Juni	30.744	(-) 41,17 %	12,92 %
Juli	29.753	(-) 3,22%	12,50 %
TOTAL	237.964		100 %

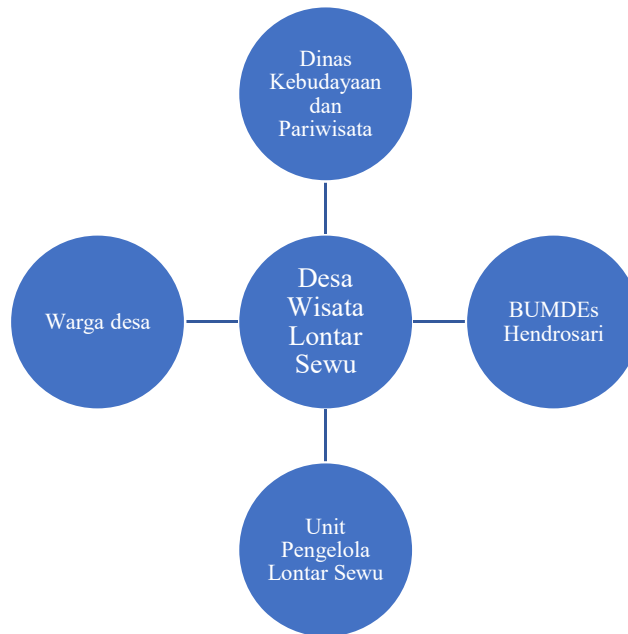
Sumber: Laporan Pengunjung Desa Wisata Lontar Sewu (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari pengunjung Lontar Sewu mencapai 62.519 pengunjung, kemudian pada bulan Februari terjadi penurunan sebesar 58,79 persen atau menurun menjadi 25.767 pengunjung, selanjutnya pada bulan Maret mengalami peningkatan sebesar 11,80 persen atau meningkat menjadi 28.807 pengunjung, namun pada bulan April terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 71,83 persen atau menurun menjadi 8.116 pengunjung. Akan tetapi pada bulan Mei mulai menunjukkan tren yang positif dimana terjadi peningkatan sebesar 84,47 persen atau meningkat menjadi 52.258 pengunjung, dan pada bulan Juni terjadi kembali penurunan sebesar 41,17 persen atau menurun menjadi 30.744 pengunjung. Pada awal bulan januari pengunjung Desa Wisata Lontar Sewu ramai pengunjung karena berada di puncak liburan tahun baru bahkan per tanggal 1 januari 2022 jumlah pengunjung mencapai 15 ribu/hari. Namun memasuki bulan berikutnya terjadi penurunan jumlah pengunjung, bahkan pada bulan april pengunjung tidak sampai dengan sepuluh ribu pengunjung, dimana hal tersebut dikarenakan musim hujan dan memasuki bulan ramadhan sehingga berdampak pada penurunan jumlah wisatawan Lontar Sewu. Namun setelah itu terjadi peningkatan yang sangat meningkat pada bulan Mei yang disebabkan adanya liburan sekolah sehingga banyak anak sekolah yang berkunjung ke Lontar Sewu.

Kemudian bulan berikutnya menunjukkan penurunan kembali, adapun kemungkinan faktor yang menyebabkan penurunan jumlah pengunjung ke Lontar Sewu ialah dikarenakan belum adanya pembaharuan dan pengembangan dari Desa Wisata Lontar Sewu , sehingga berdampak pada menurunnya daya tarik wisatawan.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap kepala urusan keuangan atau biasa disebut dengan Kaur keuangan dari Desa Hendrosari menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari BUMDEs unit wisata Lontar Sewu, pada tahun 2020 mencapai 5 – 6 miliar/tahun. Kemudian pada tahun 2021, pendapatan yang dihasilkan perbulan mencapai 1 – 1,5 miliar/bulan atau sebesar 12 – 14 miliar per tahun. Dan per akhir bulan Juli 2022 saat ini pendapatan dari wisata Lontar Sewu mencapai 5,3 miliar. Dimana seperti yang diketahui dana tersebut berasal dari keberhasilan BUMDes dalam mengelola Desa wisata yang dimiliki sehingga berdampak besar dalam perekonomiannya. Keberhasilan dari Desa Wisata Lontar Sewu tentu melibatkan para pemangku kepentingan atau *stakeholder* didalamnya. Hal tersebut dikarenakan kontribusi dan kerjasama dari para stakeholder sangat dibutuhkan dalam pengembangan obyek wisata di suatu daerah khususnya Desa Wisata Lontar Sewu . Dapat dilihat melalui bagan dibawah ini terkait *mapping stakeholder* yang berperan dalam Desa Wisata Lontar Sewu :

Bagan 1.4 *Mapping Stakeholder* Desa Wisata Lontar Sewu



Sumber: diolah peneliti (2022)

Dapat dilihat dari bagan diatas adapun pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu terdiri atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, BUMDes Hendrosari, Unit Pengelola Lontar Sewu, dan Warga desa . Keberhasilan dari pengelolaan Desa Wisata Lontar Sewu dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa keberadaan Desa Wisata Lontar Sewu dapat memberdayakan warga sesuai dengan tujuan utama dari program Kemendes PDTT bahkan telah mengurangi penduduk miskin di Desa Hendrosari. Terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berperan sebagai regulator, dimana keberhasilannya terletak pada mampu menjadi pembina mengawasi dari sisi regulasi penyelenggaraan Desa wisata dan memberikan arahan untuk selalu melakukan *monitoring* dan *evaluasi* agar pengembangan wisata pada Desa tidak hanya sekedar bertujuan untuk mendapatkan dana dari pemerintah saja kemudian wisata pada Desa tidak menjadi wisata yang berkelanjutan.

Kemudian dalam hal BUMDes Hendrosari selaku pengelola dari potensi yang dimiliki Desa Hendrosari membagi sumber daya Desa menjadi beberapa unit diantaranya unit wisata dan unit gedung serbaguna. Keberhasilan BUMDes terletak pada pembagian unit didalamnya agar fokus pengurus masing-masing unit tidak terpecah atau hanya berfokus pada satu permasalahan. Selanjutnya yakni unit pengelola Desa Wisata Lontar Sewu , yang memiliki tugas untuk menjaga dan melestarikan keberadaan Desa Wisata Lontar Sewu dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dan yang terakhir dari warga dimana warga diberdayakan untuk ikut serta menjadi pengelola dari Desa wisata melalui penyerapan tenaga kerja, kemudian menjadikan warga lebih kreatif dan inovatif melalui UKM yang berada di sekitar Desa wisata, dan warga juga dilibatkan sebagai pihak investor dari Desa Wisata Lontar Sewu . BUMDes Hendrosari tidak menerima *stakeholder* dari swasta dengan alasan mereka menginginkan dana yang diperoleh ditujukan untuk warga desa sendiri bahkan BUMDes Hendrosari hanya mau menerima investor dari warga desa setempat dengan persentase bagi hasil sebesar 4 % dari perolehan pendapatan yang berasal dari Desa Wisata Lontar Sewu . BUMDes Hendrosari tidak mau menerima investor dari para swasta karena semata ingin memberdayakan warga desa Hendrosari. Dari penjelasan dan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Lontar Sewu memiliki potensi yang kuat untuk berkembang menjadi obyek wisata yang berkelanjutan, apalagi sudah disertai dengan *stakeholder* yang berperan aktif dan melakukan pengelolaan serta pengembangan dengan baik. Banyak potensi yang ada di Desa Hendrosari yang bisa digali untuk mendukung tema *edutourism*.

Terkait dengan peran *stakeholder*, Menurut Miftah Thohah (2010) Miftah Thoha, peranan menjadi suatu rangkaian yang muncul lantaran suatu jabatan. Jadi dapat diartikan bahwa peran merupakan suatu rangkaian aktivitas teratur yang disebabkan lantaran adanya suatu jabatan ²⁰. Maka dari itu peran *stakeholder* menentukan pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu , karena apabila individu atau kelompok tidak melakukan peran sesuai dengan kedudukan atau jabatan dapat dipastikan tidak akan meraih suatu tujuan yang dimaksud. Keberhasilan peran

²⁰ Miftah Thoha. (1983). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu sudah memiliki banyak bukti diantaranya, fasilitas sarana dan prasarana Desa Wisata Lontar Sewu selalu mengalami pengembangan pada tiap tahunnya, dimana pada awal pembangunan hanya menyediakan wisata waduk untuk pemancingan dan keindahan alam dari pohon lontar yang tumbuh menjulang, namun setelah mendapatkan dana dari Kemendes PDTT, Desa Wisata Lontar Sewu sudah mengalami perkembangan yang cukup banyak diantaranya ada tambahan arena bermain sedemikian rupa dan terdapat fasilitas penunjang pariwisata seperti mushola, area parkir yang memadai, kamar mandi yang memadai, dan sebagainya, adapun nilai yang menunjukkan apabila Desa Wisata Lontar Sewu sudah mengalami pengembangan yakni dapat mendorong kesejahteraan warga setempat sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Hendrosari.

Menyikapi hal tersebut diperlukan peningkatan perkembangan pariwisata yang membutuhkan suatu strategi untuk mengatur terkait pariwisata tersebut. Dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu diperlukan peran dari para *stakeholder* yang dapat menghasilkan perencanaan terkait strategi pariwisata sehingga dapat diterima dengan baik, dapat bebas dari konflik yang timbul sepanjang implementasi kebijakan serta menyatukan mereka yang secara langsung serta tidak langsung ikut serta dalam pariwisata. Dapat diketahui bahwa pengembangan wisata di suatu daerah khususnya Edu Wisata Lontar Sewu memerlukan adanya kontribusi dan kerjasama dari *stakeholders* yang berkaitan dengan pariwisata. *Stakeholder* dalam Budimanta (2008)²¹ diartikan sebagai suatu individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan atau program pembangunan. Setiap *stakeholder* yang ada memiliki peran berbeda sehingga diperlukan pemahaman sedemikian rupa agar dapat mewujudkan pengembangan obyek wisata serta potensi wisata yang ada di tiap daerah.

²¹ A Budimanta, A Prasetijo, dan B Rudito, *Corporate social responsibility alternatif bagi pembangunan Indonesia*, ICSD, Jakarta, 2008

Peran stakeholder merupakan semua pihak yang terlibat yang mempunyai hubungan secara langsung dalam upaya pengembangan pengelolaan edu wisata Lontar Sewu. Oleh karena itu, setelah melihat potensi yang dimiliki Desa Hendrosari, pemerintah Desa dalam hal ini lembaga ekonomi Desa seperti BUMDes dan diketahui langsung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik mengajukan proposal kepada Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dengan adanya hubungan kerjasama dan koordinasi antara stakeholder pariwisata dapat mempermudah kinerja pemerintah Desa dalam upaya pengembangan pengelolaan edu wisata Lontar Sewu baik antara warga dengan pemerintah. Dibutuhkan pengarahan dan memberi pemahaman tentang sadar wisata kepada warga lokal Desa Hendrosari, adanya kemitraan antara pihak Kemendes PDTT dan warga yang mendorong jiwa kreativitas warga, dan pemerintah mengupayakan penertiban warga dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan edu wisata Lontar Sewu. Peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata adalah memberikan kebijakan dan rencana yang sistematis. Pemerintah akan menyediakan dan membangun infrastruktur untuk mendukung kegiatan pariwisata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata. Pihak swasta dapat menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas penunjang pariwisata, dikarenakan pariwisata membutuhkan banyak fasilitas pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, dan transportasi. Sama halnya dengan peran warga setempat, yakni dapat menghasilkan suasana rasa turut mempunyai tempat mata pencaharian serta pada akhirnya akan mendorong warga buat untuk turut berperan dalam melindungi kelestarian lingkungan, sehingga pengembangan pariwisata dapat menolong kesejahteraan warga.

Desa Wisata Lontar Sewu memiliki peluang besar untuk menjadi wisata unggulan di Kabupaten Gresik. Namun masih diperlukan pengelolaan yang maksimal agar semakin bertambah lengkapnya sarana prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang turut serta mengelola tempat wisata tersebut. Pada dasarnya wisata lontar sewu sudah mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah daerah dimana sudah mau menyuntikkan dana awal pembangunan sebesar Rp. 1,3

miliar melalui Program Percontohan Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dan warga setempat selaku investor juga menyalurkan dana sebesar Rp. 1,6 miliar pada tahun 2021. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kaur keuangan Desa Hendrosari yang merangkap menjadi tim kreatif dan marketing Desa Wisata Lontar Sewu Arif Noveri, menyatakan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu tidak ada hambatan dari BUMDes selaku pengelola Desa wisata tersebut, namun hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu berasal dari warga setempat, dimana pada saat awal proses pembangunan Desa wisata, warga tidak percaya dengan BUMDes terkait dengan keberadaan Desa wisata di Desa Hendrosari karena dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat wisata. Kemudian, setelah menjadi tempat wisata, hambatan yang ditemukan ialah terkait warga sebagai tenaga kerja dalam Lontar Sewu tersebut, dimana masih banyak karyawan yang susah diatur karena menganggap ‘sudah kenal’ dengan pihak Desa selaku BUMDes sehingga berdampak pada pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu karena apabila masih banyak karyawan yang tidak maksimal memberikan pelayanan terhadap pengunjung tentu berdampak pada penurunan jumlah pengunjung sebab mungkin ada beberapa pengunjung yang tidak datang kembali dengan alasan tidak mendapatkan pelayanan yang baik pada saat mengunjungi Desa Wisata Lontar Sewu²². Selain itu adanya perubahan jumlah pengunjung yang fluktuatif, kemungkinan turun atau naiknya jumlah pengunjung pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kapasitas *stakeholder*. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengidentifikasi peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada seperti memaksimalkan kinerja pemangku kepentingan yang terlibat dan menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan. Serta peneliti ingin mengetahui apakah perubahan jumlah pengunjung yang fluktuatif disebabkan oleh *stakeholder* terkait.

²² Wawancara langsung dengan tim marketing Desa Wisata Lontar Sewu , Arif Noveri pada 1 Agustus 2022.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mendasarkan pada sepuluh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian dengan rincian lima penelitian terdahulu berkaitan dengan lokasi penelitian yaitu Desa Wisata Lontar Sewu serta lima penelitian terdahulu pendukung yang berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam pengembangan obyek wisata. Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan media *google scholar* dengan menggunakan *keyword search* “lontar sewu” dan “peran stakeholder dalam pariwisata” dengan rentang waktu Januari 2018 (01 – 2018) hingga Juni 2022 (06 – 2022) dengan rincian disajikan dalam tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.9 Penelitian Terdahulu

No.	Artikel	Temuan	Perbedaan
1.	Arthemevia Indhawati dan Agus Widiy arta “Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu Oleh BUMDesa ” Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No. 2 (2022)	Adapun Pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh BUMDesa lontar sewu sebagai penggerak dari objek wisata lontar sewu telah dijalankan dengan baik. Keberhasilan tersebut dinilai dari empat indikator Pengembangan destinasi wisata oleh Sedarmayanti (2018) diantaranya, daya tarik wisata, atraksi, fasilitas dan aksesibilitas terkait dengan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji mengenai bagaimana BUMDesa melakukan pengembangan objek wisata Lontar Sewu. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .

		pengembangan pariwisata keempat indikator tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun, peneliti menyatakan masih terdapat kendala dalam proses pengembangan dimana masih kurangnya fasilitas umum seperti tempat ibadah dan stop kontak listrik di dalam gazebo.	
2.	Rani Wahyuningsih dan Galih Wahyu Pradana “Pemberdayaan Warga desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu ” Jurnal Publika, Vol. 9, No. 2 (2021)	Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Pada penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa dengan adanya pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu mampu memberdayakan banyak warga. Serta meningkatkan kemandirian dan kreativitas warga karena warga dapat memanfaatkan potensi alam sebaik mungkin. Namun peneliti juga menyatakan bahwa masih diperlukan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM yang ada agar dapat menambah wawasan warga desa Hendrosari.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji tentang pemberdayaan warga yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .

3.	Muchlis Eny Nur, Skripsi: “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Pilot Inkubasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) (Studi Kasus Wahana Eduwisata Lontar Sewu Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)” (Surabaya, Universitas Wijaya Putra) (2020)	Adapun pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menyebutkan bahwa Program Percontohan Inkubasi Inovasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) yang berupa Desa Wisata Lontar Sewu memiliki beberapa manfaat yakni meningkatnya perekonomian di Desa Hendrosari dan menghapus stigma buruk tentang Desa Hendrosari.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji mengenai inovasi pelayanan publik melalui Program Pilot Inkubasi Desa - Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .
4.	Shafa Raya Cahyana dan Saptono Nugroho “Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang,	Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menyebutkan bahwa Desa Wisata Carangsari memiliki tiga <i>stakeholder</i> yang berperan dalam melaksanakan keberlangsungan pariwisata.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi dan teori <i>stakeholder</i> yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji peran <i>stakeholder</i> di Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang,

	Kabupaten Badung” Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 7, No.2 (2019)	Diantaranya ialah pemerintah Desa Carangsari, pengusaha lokal, dan warga lokal. Namun, peneliti menyatakan bahwa masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan Desa wisata ini.	Kabupaten Badung dan menggunakan konsep tiga (3) pilar pariwisata diantaranya sebagai lingkup administratif, pengusaha, dan warga lokal. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Lontar Sewu , Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et al., (2014) diantaranya <i>policy creator</i>, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
5.	Septian Rio Bramana, Skripsi: “Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Alam di Kabupaten Jombang” (Surabaya, Universitas Airlangga) (2018)	Adapun pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa terdapat beberapa <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan serta peningkatan potensi pariwisata alam di Kabupaten Jombang diantaranya ialah Dinas Pariwisata Jombang, BPD,	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi dan teori <i>stakeholder</i> yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Jombang dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari P. Siagian (2003) yang diklasifikasikan menjadi modernisator,

		Badan Promosi Pariwisata Jombang, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jombang, LSM, Pokdarwis, dan masyarakat lokal. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan peran dan strategi dalam pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Jombang	katalisator, dinamisator, stabilitator, dan pelopor. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Lontar Sewu, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et al., (2014) diantaranya <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
6.	Ni'mah A.Hidayah, Simon S. Hutagalung, dan Dedy Hermawan “Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu”	Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa pariwisata Talang Air memiliki <i>stakeholder</i> yang terdiri dari warga, pemerintah, dan sektor swasta, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Kemudian, peneliti menyatakan dalam pengembangan pariwisata Talang Air terdapat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi dan teori <i>stakeholder</i> yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Townsley dan Bryson. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Lontar Sewu, Desa

	Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 7, No. 1. (2019)	kerjasama dan komunikasi yang baik antar <i>stakeholder</i> sehingga dapat mempercepat proses implementasi.	Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et al., (2014) diantaranya <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
7.	Riska Destiana, Kismartini, dan Tri Yuningsih “Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8, No. 2. (2020)	Adapun pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau melibatkan <i>stakeholder</i> pentahelix diantaranya Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media Massa. Namun, peneliti menyatakan bahwa terdapat hambatan didalamnya terkait dengan kepercayaan serta kebijakan yang dibuat dalam pengembangan wisata.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi dan teori <i>stakeholder</i> yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau dan menggunakan konsep pentahelix yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Lontar Sewu , Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et

			al., (2014) diantaranya <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
8.	Risa Amalia Kurniawati, Natasya Shaherani, Basuhnami Lena Leopold Coutrier, dan Hawa Sukmawati “Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi Sebagai Destinasi Wisata Bahari” Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 16, No. 1 (2022)	Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif yang menyebutkan bahwa pengembangan Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa <i>stakeholder</i> diantaranya warga lokal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan pihak swasta. Namun peneliti menyatakan bahwa kurangnya kesadaran dan peran aktif dari warga lokal dalam pengelolaan Pantai Merah yang menjadikan penghambat dalam pengembangan wisata tersebut.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi dan teori <i>stakeholder</i> yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi yang berfokus pada deskripsi wisata, penjelasan peran <i>stakeholder</i> yang terlibat, dan menjelaskan aspek terkait pendukung dan penghambat peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata tersebut. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Lontar Sewu, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et al., (2014) diantaranya

			<i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
9.	Diana Hertati, Dinda Fitri Ayu Rahmawati, Qoric Arsita, dan Silvia Eka Ramadhani Putri Gunawan “Pengembangan Potensi Desa Hendrosari Sebagai Desa Wisata Edukasi di Kabupaten Gresik” Jurnal Publicuho, Vol. 4, No.1 (2021)	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pada penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa Desa Hendrosari memiliki area yang terdapat pohon lontar diatasnya, apabila dilihat dari daya tarik wisata alam dapat dijadikan Desa wisata yang berkontribusi untuk membangun Desa . Namun peneliti menyatakan bahwa dalam implementasinya, tidak terdapat konsep edukasi sesuai dengan tujuan didirikannya Edu Wisata Lontar Sewu.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji mengenai bagaimana strategi melakukan pengembangan objek wisata Lontar Sewu dengan menggunakan teori dari Sedarmayanti dalam Hardjati & Rusdiana (2019) terkait pengembangan destinasi wisata terdiri dari daya tarik wisata alam, atraksi, fasilitas, dan aksesibilitas. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu yang menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et al., (2014) diantaranya <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.

10.	Mujid Kurmidianat dan Bagiyo Suwasono “Analisis Strategi Pengembangan Wisata Lontar Sewu menggunakan Metode SWOT” Jurnal Jaring SainTek, Vol. 4, No. 1 (2022)	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa wisata lontar sewu memiliki danau yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sumber dayanya maka dari itu diperlukan analisis SWOT untuk menganalisis potensi yang sudah ada. Namun peneliti menyatakan bahwa diperlukan rencana terkait pengembangan wisata danau agar lebih komprehensif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji mengenai strategi melakukan pengembangan objek wisata Lontar Sewu dengan menggunakan analisa SWOT diantaranya <i>strenght</i>, <i>weakness</i>, <i>opportunity</i>, dan <i>threats</i>. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu yang menggunakan teori <i>stakeholder</i> dari Nugroho et al., (2014) diantaranya <i>policy creator</i>, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator.
-----	---	---	---

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pemaparan dalam tabel I.9, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua poin utama, yakni perbedaan terkait fokus penelitian dan perbedaan terkait metode penelitian. Pertama, berkenaan dengan fokus penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian di Desa Wisata Lontar Sewu terdapat berbagai fokus diantaranya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu mampu memberdayakan warga desa, serta meningkatkan kemandirian dan kreativitas warga karena warga dapat memanfaatkan potensi alam sebaik mungkin. Kemudian ada pula penelitian yang berfokus pada inovasi pelayanan publik melalui Program Pilot Inkubasi Desa -Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Hasilnya menunjukkan bahwa keberlangsungan program tersebut memiliki beberapa manfaat yakni meningkatkan perekonomian di Desa Hendrosari dan menghapus stigma buruk tentang Desa Hendrosari. Selanjutnya terdapat penelitian yang berfokus pada analisis strategi pengembangan Wisata Lontar Sewu menggunakan metode SWOT. Hasilnya menunjukkan bahwa Wisata Lontar Sewu memiliki danau yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sumber dayanya yang dianalisis menggunakan metode SWOT untuk rencana pengembangan wisata danau agar lebih komprehensif. Berkenaan dengan berbagai fokus penelitian tersebut, dapat diketahui masih belum ada penelitian yang membahas tentang pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu dengan perspektif *stakeholder*. Dalam hal ini peneliti akan memetakan *stakeholder* serta melihat peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu.

Kedua, metode penelitian, dari hasil uraian dalam tabel I.9, dapat diketahui bahwa memang pada dasarnya mayoritas penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian, namun terdapat satu penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan penelitian yang menggunakan metode analisis SWOT dalam melihat strategi pengembangan Wisata Lontar Sewu, sebagaimana penelitian tersebut dilakukan oleh Mujid Kurmidianat dan Bagiyo Suwasono (2022). Perbedaan-perbedaan yang telah

dikemukakan di atas merupakan bentuk *state of the art* yang terdapat dalam penelitian ini. Di sisi lain, perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian (*research gap*). Untuk mengisi *research gap* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu dengan menganalisis peran *stakeholder* yang terlibat didalamnya sebagai fokus penelitian, yang dikemas menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan empat instrumen pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan materi audio-visual.

I.2 Rumusan Masalah

Pengembangan wisata harus dikelola secara dinamis, tidak monoton, tidak kaku, dan kemudian tidak sekali bangun untuk selamanya karena seperti yang diketahui bahwa keinginan pasar selalu berubah-ubah sesuai dengan trend, sehingga sebagai penyedia jasa dalam hal ini adalah Desa harus tanggap pada keinginan pasar atau wisatawan dan harus diikuti karena dalam mengelola wisatan dipastikan terdapat perubahan-perubahan sehingga pengelola dituntut harus kreatif dan inovatif, karena kalau tidak seperti itu tingkat kunjungannya akan menurun karena dari sudut pandang wisatawan pun juga mempunyai kejenuhan kemudian mereka cenderung ingin mengeksplor suasana yang baru, akan tetapi jika pengelola mampu memperbarui kondisi dari daya tarik wisatanya itu secara dinamis sesuai dengan keinginan pasar pasti wisata itu tidak akan sampai sepi perlu juga dipikirkan unsur *sustainability* nya kalau tidak begitu pasti akan sepi bahkan bisa tutup maka dari itu diperlukan peran dari *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peta *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu ?
2. Bagaimana peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu ?

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan sebuah pedoman dalam membahas penelitian serta menjawab permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi bagaimana peta *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu
2. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi bagaimana peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu

I.4 Manfaat Penelitian

Pengaktualan dari tujuan penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam hal ini, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

I.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini didapatkan secara teoritis dan metodologis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu sehingga tujuan tersebut dapat digunakan sebagai upaya pengembangan obyek wisata di Kabupaten Gresik. Kemudian secara metodologis, berdasarkan analisis studi terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada yang meneliti tentang mengenai peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata yang berlokasi di Desa Hendrosari tepatnya Desa Wisata Lontar Sewu. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat melalui kajian dalam peran *stakeholder* dalam pengembangan obyek wisata. Selanjutnya penelitian ini turut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu administrasi publik khususnya aspek kelembagaan dalam pengelolaan dana Desa serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam pengembangan obyek wisata.

I.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian tentang peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu diharapkan informasi hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah (Pemerintah Desa Hendrosari dan Pemerintah Kabupaten Gresik), *civil society* (warga desa Hendrosari, akademisi, media), dan *private sector* (mitra Desa Hendrosari) yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagai bahan perbaikan kinerja agar lebih mampu mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gresik. Serta keberhasilan Desa Hendrosari dalam mengembangkan potensi yang dimiliki diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah Desa lain dalam pemanfaatan potensi daerah dengan melakukan studi banding melalui hasil penelitian ini.

I.5 Landasan Teori

W. Lawrence Neuman dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif” menjelaskan bahwa teori dapat membantu untuk memahami kompleksitas suatu kehidupan sosial²³. Teori dapat digunakan untuk memperjelas pemikiran, mengembangkan pemahaman, memperdalam diskusi, dan memperkaya analisis. Hal tersebut berperan penting untuk mengembangkan pengetahuan dan menyusun cara pelaksanaan penelitian²⁴.

I.5.1 Kebijakan Publik

Di dalam berbagai literatur, terdapat banyak pengertian atau rumusan yang menjelaskan tentang arti kebijakan publik. Rakhmat dalam bukunya yang berjudul “Administrasi dan Akuntabilitas Publik” menjelaskan pengertian kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Rakhmat melanjutkan bahwa kebijakan merupakan hasil analisis yang hasilnya berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang dipilih²⁵. Di dalam buku

²³ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. Edina T. Sofia, 7th ed. (Jakarta Barat: PT Indeks, 2017).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rakhmat, *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*, 1st ed. (Yogyakarta: cv. andi offset, 2018), hlm. 71-72.

“Administrasi dan Akuntabilitas Publik” juga memaparkan beberapa pengertian kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik tersebut antara lain.

Tabel 1.10 Definisi Kebijakan Publik Beberapa Tokoh

NO.	Tokoh	Pengertian
1.	Anderson (1990)	Kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.
2.	Jones (1992)	Serangkaian perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik.
3.	Chandler dan Plano (1988)	Pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara strategis untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
4.	Hogwood dan Gunn (1984)	Suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Sumber: Rakhmat (2018)

Prof. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif” juga menyajikan berbagai definisi kebijakan publik dari para ahli yang memiliki penekanan yang berbeda-beda. Kebijakan publik membahas mengenai bagaimana isu-isu dan persoalan yang terjadi disusun dan didefinisikan, serta bagaimana hal tersebut dapat menjadi agenda kebijakan dan agenda politik²⁶. Winarno mendefinisikan kebijakan publik secara umum sebagai perilaku yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu²⁷. Definisi kebijakan tersebut kurang tepat apabila digunakan dalam kajian yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, Dan Studi Komparatif*, 1st ed. (Jakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2016), hlm. 18.

²⁷ Ibid., 19.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan ²⁸. Definisi tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai keputusan pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, Carl Frederich mendefinisikan kebijakan dalam dimensi yang lebih luas. Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang dapat memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang digunakan dan untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan ²⁹. Definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Frederich mengandung dimensi yang luas karena tidak hanya menyangkut tindakan pemerintah saja, namun menyangkut tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

James Anderson memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai definisi kebijakan publik. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson tidak hanya mengenai usulan arah tindakan, tetapi juga mencakup arah tindakan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ia mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang memiliki tujuan tertentu oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan. Definisi tersebut tepat karena memusatkan perhatian pada yang seharusnya dilakukan, bukan yang seharusnya diusulkan. Selain itu, pendapat Anderson tersebut membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia ³⁰. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pemilihan alternatif terbaik yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang digunakan sebagai arah tindakan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

²⁸ Ibid., 19.

²⁹ Ibid., 20.

³⁰ Ibid., 20.

I.5.1.1 Sifat Kebijakan Publik

Sebagaimana dikutip dari Leo Agustino (2008) sifat kebijakan publik menjadi bagian dari suatu kegiatan yang dapat dipahami secara baik apabila dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya ³¹:

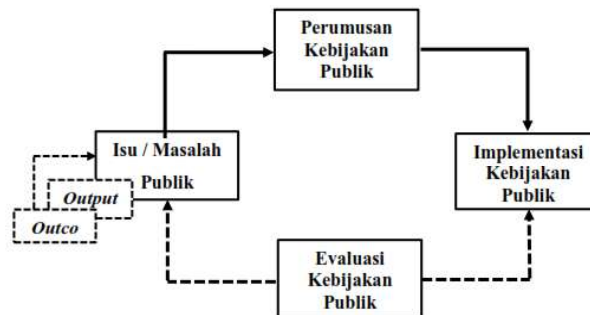
1. Permintaan kebijakan atau *policy demands* yakni sebuah permintaan atau kebutuhan atau klaim yang resmi dibuat oleh warga secara individu atau kelompok dan masuk ke dalam sistem politik dikarenakan adanya permasalahan yang dirasakan. Permintaan dapat berupa permintaan umum kepada pemerintah untuk mengambil tindakan, atau dapat berupa usulan untuk mengatasi masalah tertentu.
2. Putusan kebijakan atau *policy decisions* merupakan keputusan yang dibuat oleh pejabat untuk mengarahkan kegiatan. Yang tercantum didalamnya terkait keputusan untuk menghasilkan ketetapan, menghasilkan ataupun mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan ketentuan administratif, ataupun membuat interpretasi hukum yang berarti.
3. Pernyataan kebijakan atau *policy statement* adalah ungkapan formal atau klarifikasi dari keputusan kebijakan yang ditetapkan. Pernyataan kebijakan terkadang membingungkan, seperti yang dapat dilihat melalui konflik yang muncul ketika menafsirkan suatu ketetapan publik.
4. Hasil kebijakan atau *policy output* merupakan perwujudan nyata dari kebijakan publik, atau sesuatu yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keputusan dan pernyataan kebijakan. Singkatnya, hasil dari kebijakan adalah apa yang telah dilakukan pemerintah.
5. Akibat dari kebijakan atau *policy outcomes* merupakan hasil dari kebijakan yang diterima warga, baik yang diinginkan maupun tidak, dan berasal dari apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan.

³¹ Leo Agustino, *Dasar – dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

I.5.1.2 Tahap Kebijakan Publik

Tahap dari perumusan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks. Hal ini dikarenakan dalam proses perumusan kebijakan publik, banyak hal yang perlu dikaji. Beberapa ahli mengembangkan tahapan kebijakan publik. Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”. Menyampaikan bahwa tidak mudah untuk menciptakan kebijakan publik yang baik dan tepat, namun bukan kebijakan publik yang baik dan tepat tidak dapat tercipta. Nugroho memberikan saran teoritis dan metodologis yang ideal tentang siklus umum kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan pada bagan di bawah ini ³²:

Bagan 1.5 Tahap Kebijakan Publik Riant Nugroho



Sumber: Nugroho (2003)

Dari bagan 1.5 diatas dijelaskan mengenai tahapan dari pembuatan kebijakan publik menurut Nugroho (2003) sebagai berikut:

1. Adanya isu atau masalah publik. Disebut isu apabila permasalahan bersifat strategis, diantaranya fundamental, menyangkut keselamatan bersama, (biasanya) memiliki jangka yang panjang, wajib dituntaskan dan tidak dapat dituntaskan oleh orang - seorang. Isu ini diangkat sebagai agenda politik yang harus diselesaikan.
2. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah akan melanjutkan untuk mengembangkan kemudian menyelesaikan kebijakan publik yang

³² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (PT. Elex Media Komputindo, 2003).

ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pembuatan kebijakan akan menjadi hukum untuk semua negara, termasuk kepala negara, dan warganya.

3. Setelah pemerintah merumuskan kebijakan publik, maka kebijakan tersebut diimplementasikan baik oleh pemerintah, warga, maupun pemerintah beserta warga.
4. Akan tetapi, dalam proses perumusan, implementasi dan pasca implementasi, diperlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru yang bertujuan guna memberikan evaluasi apakah kebijakan sudah diformulasikan dengan baik serta benar dan telah diimplementasikan dengan baik serta benar juga.
5. Hasil dari implementasi kebijakan adalah output, yang dapat berupa kebijakan itu sendiri atau manfaat langsung yang dirasakan oleh penerima manfaat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membuahkan hasil berupa outcome terhadap kebijakan yang diharapkan terus membaik sehingga dapat mencapai tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan.

Kemudian terdapat pula pendapat mengenai tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn, sebagaimana dikutip dari Budi Winarno dalam buku yang berjudul “Kebijakan Publik: Teori dan Proses” yang mengkonstruksi tahapan-tahapan kebijakan publik menjadi beberapa langkah sebagai berikut ³³

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, pejabat terpilih dan diangkat menempatkan masalah ini dalam agenda publik. Sebelumnya, isu tersebut awalnya memperebutkan untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Kemudian, beberapa isu masuk dalam agenda pembuat kebijakan. Selama fase penetapan agenda, mungkin ada masalah yang belum ditangani sama sekali, atau masalah yang ditunda karena alasan tertentu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

³³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, edisi revisi. (Yogyakarta: Media Presindo, 2007).

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dibahas lebih lanjut oleh para pengambil keputusan. Isu-isu ini didefinisikan untuk menemukan solusi alternatif terbaik untuk masalah ini. Pemecahan masalah ini datang dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada fase ini, para aktor saling bersaing dan mencoba mengusulkan solusi terbaik untuk masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang diajukan oleh pengambil keputusan, salah satu dari berbagai alternatif tersebut akan diambil dengan dukungan mayoritas legislatif, kesepakatan antara direksi lembaga atau keputusan yudisial.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang diambil kemudian diimplementasikan unit-unit administratif yang memobilisasi sumber daya manusia dan keuangan. Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan jika tidak dilaksanakan, apabila dilaksanakan oleh badan-badan administratif maupun oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Pada tahap ini, kepentingan yang berbeda akan berbenturan. Beberapa implementasi kebijakan didukung oleh implementator, akan tetapi yang lain mungkin ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang diimplementasikan akan dinilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah mampu mencapai dampak yang diharapkan, khususnya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran ditetapkan sebagai dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Setelah melihat bagan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan publik terdapat tiga kegiatan utama, yakni perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

I.5.1.3 Tipologi Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik diperlukan pengembangan pemahaman untuk dapat membantu mengetahui perbedaan antara kebijakan dan menggeneralisasikan kebijakan. Adapun tipologi tradisional yang sering ditemukan, yakni: Kebijakan Substantif, Kebijakan Institusional, dan Kebijakan *Time-Period*. Akan tetapi, apabila terdapat perubahan sosial, pendekatan tradisional tidak mendapatkan perhatian yang serius. Adapun sejumlah bentuk baru yang dikembangkan agar dapat mengerti esensi dari kebijakan publik, diantaranya ³⁴:

1. Kebijakan Substansial atau Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif termasuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pembayaran tunjangan untuk pendidikan, kesehatan, dukungan serta bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) atau kesejahteraan umum. Sedangkan kebijakan prosedural, yang masuk ke dalam kebijakan tersebut ialah terkait siapa yang mengimplementasikan atau cara pelaksanaannya.

Perbedaan antara kebijakan substansial dan kebijakan prosedural adalah melihat isi dari kebijakan itu sendiri. Jika isi kebijakan lebih menitikberatkan pada upaya pengentasan permasalahan yang dialami warga, maka kebijakan tersebut bersifat substantif. Namun, apabila sebuah kebijakan yang telah ditetapkan hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan, maka termasuk kebijakan prosedural. Fokus kebijakan prosedural adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan benar. Kebijakan prosedural juga memiliki efek fundamental yang penting, tetapi tidak secara langsung menargetkan kepentingan publik, yakni lebih mengarah bagaimana sesuatu dilakukan dan siapa yang melakukannya. hal tersebut dapat membantu birokrasi untuk membedakan apa yang harus benar-benar dilakukan.

³⁴ Agustino, *Loc. Cit.*

2. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif

Secara sederhana, kebijakan liberal dapat diartikan sebagai pemahaman yang menuntut kebebasan individu dalam setiap tindakannya, sedangkan kebijakan konservatif adalah pemahaman yang membutuhkan tekad yang konstan dalam setiap tindakannya. Adapun perbedaan antara kebijakan liberal dan konservatif, sebagai berikut:

- a. Pelibatan pemerintah sebagai aparatur implementator kebijakan itu sendiri. Liberal secara umum didukung (atau digunakan/dilibatkan) oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah perubahan sosial yang disadari warga. Sementara itu, kebijakan konservatif, tidak melibatkan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Pihak liberal sedang mendiskusikan berbagai kekurangan kehendak yang ada di warga yang memerlukan kebijakan publik untuk memperbaikinya. Sementara itu, pihak konservatif berpendapat bahwa kehendak rakyat sudah terpenuhi dan ada yang perlu diubah secara perlahan dan bertahap melalui proses sosial yang alamiah.
- c. Pihak liberal cenderung mendukung kebijakan yang melindungi kepentingan konsumen dan minoritas. Sedangkan pihak konservatif cenderung mendukung kebijakan publik atau privat yang dapat memajukan kepentingan bisnis.
- d. Kebijakan liberal menuntut pemerintah untuk mengoreksi ketidakadilan dan kelemahan yang ada pada peraturan pemerintah sebelumnya. Namun, kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan-aturan sosial yang mereka anggap baik dan mapan, sehingga tidak diperlukan upaya untuk mengubah warga (mempertahankan *status quo*). Akan tetapi, jika masih perlu melakukan perubahan, maka perlu berhati-hati dan melakukannya secara alamiah.
- e. Kebijakan liberal cenderung melindungi minoritas dan kepentingan konsumen. Sementara kebijakan konservatif, di sisi lain, melindungi atau mendukung kepentingan kelompok partai yang berkuasa dan para produser.

Perlu untuk dicatat bahwa kebijakan publik dapat menjadi perubahan yang lebih produktif daripada periode sebelumnya, karena kebijakan publik dirancang untuk membantu mempertahankan suatu hal yang sudah ada, dan kebijakan publik dapat mendukung baik pihak liberal maupun pihak konservatif.

3. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator, dan Kebijakan *Self-Regulatory*

Pengelompokan kebijakan ini didasarkan pada dampak sosial dan hubungannya dengan pembentukan kebijakan. Kebijakan distribusi terdiri dari distribusi jasa atau keuntungan di sektor tertentu, baik kepada individu maupun kelompok kecil dan komunitas tertentu. Kebijakan distribusi ditandai dengan mengejar keuntungan dengan tidak bersaing secara langsung dengan pihak lain. Keuntungan mereka dibebankan pada dana umum, yang diminta pada semua pembayar pajak. Kebijakan redistribusi mencakup upaya pemerintah yang bijaksana untuk mengalihkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, atau hak antar kelompok penduduk.

Kebijakan Regulator merupakan kebijakan yang memberlakukan pembatasan atau larangan terhadap tindakan atau tindakan seseorang atau sekelompok individu. Kebijakan ini pada dasarnya membatasi kebebasan individu atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan *self-regulatory*, di sisi lain, adalah bentuk regulasi kebijakan dalam bentuk pembatasan atau pengendalian materi atau kelompok tertentu. Kebijakan *self-regulatory* umumnya dicari dan didukung melalui seperangkat aturan untuk melindungi atau mempromosikan kepentingan mereka sendiri.

4. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis

Kebijakan material merupakan kebijakan yang dirancang untuk menyediakan sumber pendapatan atau kekuasaan yang nyata bagi mereka yang mendapat manfaat, atau merugikan bagi mereka yang terkena kerugian. Atau, secara sederhana, kebijakan material adalah kebijakan yang menyediakan sumber daya material tertentu kepada penerima. Sedangkan, kebijakan simbolis, di sisi lain, membagi keuntungan atau kerugian yang

berdampak kecil pada manusia. Pengelompokan kebijakan ke dalam kebijakan simbolis dan material harus dianggap sebagai satu set entitas. Kebijakan yang paling terjangkau di set pada dasarnya lebih simbolis atau material.

5. Kebijakan Kolektif dan Kebijakan Privat

Kebijakan publik juga dapat dimasukkan ke dalam ketetapan yang merupakan kebijakan kolektif (tidak dapat dibagi) atau privat (dapat dibagi). Yang disebut barang publik adalah pedoman (kolektif) untuk menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan warga. Contoh yang dimaksud dengan barang publik ialah kebersihan udara, keamanan publik, dan pemantauan rambu lalu lintas. Sedangkan Kebijakan privat adalah kebijakan yang dapat dibagi menjadi unit yang dapat dibiayai dan dijual untuk satu pengguna. Pemerintah menyediakan berbagai jenis barang sosial seperti pelayanan pos, perawatan medis, museum dan taman nasional. Secara umum dikatakan bahwa semakin banyak kualitas barang publik yang diberikan semakin mungkin diterima bila hal itu ditetapkan oleh pemerintah.

I.5.1.4 Analisis Kebijakan Publik

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian kebijakan telah banyak digunakan ketika pemerintah membutuhkan banyak pertimbangan dan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang sederhana pun secara langsung dapat diidentifikasi dengan cara mengembangkan alternatif kebijakan.

Analisis kebijakan adalah studi yang tidak tertutup untuk penelitian sektor publik, karena sektor swasta juga menggunakan metode analisis kebijakan dalam banyak cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Analisis Kebijakan memberikan rekomendasi kebijakan terbaik bagi klien untuk mengatasi masalah tertentu, mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, mengevaluasi dan memprediksi kebijakan, dan mengatasi masalah yang mereka

hadapi³⁵. Definisi analisis kebijakan dijelaskan oleh para ahli dalam literatur akademik tentang administrasi. Masing-masing definisi tersebut memiliki penekanan yang berbeda.

William Dunn menggambarkan analisis kebijakan sebagai aktivitas intelektual dan yang langsung didedikasikan untuk mengembangkan pengetahuan, penilaian kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses kebijakan. Kemudian terdapat definisi analisis kebijakan dari Walter William, yakni sebuah cara untuk mengintegrasikan informasi, termasuk temuan, untuk membuat format pengambilan keputusan kebijakan (ditentukan dari serangkaian keputusan alternatif) dan untuk menentukan informasi terkait kebijakan³⁶. Sedangkan menurut Thomas R. Dye, analisis kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa yang mengubah hasilnya³⁷.

Dari pemaparan mengenai analisis kebijakan publik dari beberapa para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis kebijakan adalah metode pengumpulan informasi, termasuk penelitian, menghasilkan dan menciptakan bentuk keputusan kebijakan yang ditentukan dari berbagai pilihan, dan menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi yang relevan tentang proses keputusan kebijakan.

I.5.1.5 Stakeholder dalam Kebijakan Publik

Istilah *stakeholder* pertama kali muncul pada dalam sebuah memorandum internal pada *Stanford Research Institute* pada tahun 1963³⁸. Adanya *stakeholder* dalam kebijakan publik berhubungan dengan adanya konsep *governance*. Wachhaus mengemukakan bahwa adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* terjadi ketika pemerintah tidak hanya tentang pemerintah lagi.

³⁵ Dwiyantho Indiahono. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, hal 4.

³⁶ Riant Nugroho. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia, hal 7.

³⁷ Solichin Abdul Wahab. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, hal 4.

³⁸ R. Edward Freeman dan L. Reed David. (1983). “*Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance*”, *California Management Review*, Vol. 25 No. 3, hal 88–106.

Tembok pemerintah menjadi lebih rapuh, menyebabkan aktor dari berbagai sektor dapat terlibat dalam proses pemerintahan³⁹.

Adanya pergeseran paradigma tersebut telah menempatkan pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara. Tata kelola pemerintah serta manajemen publik tidak lagi terpusat kepada pemerintah namun telah bergeser menjadi tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen mulai dari pemerintah, warga, organisasi non pemerintah hingga pihak swasta. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Keberadaan dari berbagai pihak atau para pemangku kepentingan juga harus dipertimbangkan, termasuk dalam konteks kebijakan publik. Kebijakan publik tidak lepas dari adanya hubungan atau keterlibatan dengan para *stakeholder* mulai dari proses pengambilan keputusan hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi dari berbagai pihak memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Jika dianalisis mengenai proses kebijakan publik dalam program pengembangan obyek wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, terdapat *stakeholder* yang terlibat diantaranya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, Kementerian Desa , Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah Desa Hendrosari dalam hal ini yang dimaksud ialah BUMDEs selaku pengelola edu wisata Lontar, kemudian warga setempat, serta masyarakat yang menjadi pelaku usaha dan investor di Desa Wisata Lontar Sewu .

I.5.2 Teori Stakeholder

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki *stakeholder* ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur-literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai *stakeholder* adalah *Strategic Management: A*

³⁹ Aaron Wachhaus. (2014) “*Governance Beyond Government*” *Administration and Society*, Vol. 46 No. 5, hal 573–593.

Stakeholder Approach oleh Freeman (1984). Sejak itu banyak sekali studi yang membahas mengenai konsep *stakeholder*. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Freeman dkk., 2004). Menurut Freeman (1984), *stakeholder theory* merupakan suatu teori yang menggambarkan tentang hubungan individu atau kelompok yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan ataupun dapat mempengaruhi kegiatan suatu perusahaan. Freeman (1984) menyatakan terdapat dua model pada teori *stakeholder* yaitu model kebijakan serta upaya merencanakan bisnis dan model SR dari manajemen *stakeholder*. Freeman (1984) juga mendefinisikan bahwa teori *stakeholder* sebagai teori yang menyatakan serta mendefinisikan pada pihak mana saja perusahaan akan bertanggungjawab. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus 11 memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan. Ghazali dan Chariri (2007) dalam Sagala (2015) berpendapat bahwa teori stakeholder mempunyai titik acuan dalam pengambilan keputusan managerial sehingga membuat perusahaan mengusahakan untuk member informasi serta pengetahuan yang memiliki nilai manfaat bagi para stakeholder. Salah satu strategi perusahaan dalam upaya menjaga hubungan dengan para stakeholder dapat menggunakan cara seperti mengungkapkan kegiatan corporate social responsibility dalam laporan tahunan perusahaan yang

memberikan informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan serta sosial perusahaan.

Penelitian ini menggunakan teori stakeholder dikarenakan dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu melibatkan beberapa aktor *stakeholder* dan juga keberadaan objek wisata tersebut memberikan manfaat bagi *stakeholder* yang berkaitan khususnya Pemerintah Desa Hendrosari melalui pendapatan PAD yang cukup tinggi dari produk wisata yang dikelola oleh BUMDEs Hendrosari.

I.5.3 Definisi Stakeholder

Stakeholder atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemangku kepentingan memiliki definisi yang beragam. Menurut Freeman, *stakeholder* yaitu *any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives* atau *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu⁴⁰. Biset mendefinisikan *stakeholder* dengan definisi yang lebih singkat yaitu orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Grimble dan Wellard melihat *stakeholder* dari segi pengaruh serta posisi penting yang mereka miliki⁴¹. Dari sudut pandang semantik, menurut Hornby (1995), pemangku kepentingan didefinisikan sebagai individu, organisasi, dan sebagainya yang berperan dalam bisnis industri. Sementara dalam implementasi program pembangunan, Race dan Millar (2006) menyampaikan bahwa *stakeholder* dimaksudkan untuk menggambarkan definisi komunitas atau organisasi dimana para pemangku kepentingan akan secara berkelanjutan menerima dampak dari suatu kegiatan atau kebijakan jika mereka tertarik dengan hasil dari kegiatan atau kebijakan tersebut. Adapun pendapat mengenai *stakeholder* yang dikemukakan oleh Gonsalves et al. (2005) menggambarkan pemangku kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat merujuk pada dimensi yang berbeda dari laki-laki, perempuan, komunitas,

⁴⁰ R. Edward Freeman. (1984). *Strategic Management : A Stakeholders Approach*. Boston: Pitman.

⁴¹ Busyra Azecri. (2012). *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

kelompok sosial-ekonomi dan institusi pada tiap tingkat lapisan warga. Dari pemaparan diatas mengenai definisi *stakeholder* dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* merupakan suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan serta ketertarikan pada sesuatu baik pada suatu kegiatan maupun kebijakan.

Jika berbicara mengenai teori stakeholder, maka hal tersebut berarti bahwa kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Perlu dipahami bahwa stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Teori stakeholder berpendapat bahwa sebuah korporasi bukanlah suatu entitas yang dapat beroperasi atau berdiri sendiri jika hanya mementingkan kepentingannya tanpa memikirkan manfaat bagi para stakeholdernya. Sehingga keberadaan dari stakeholder sangat mempengaruhi dan berperan dalam memberikan dukungan bagi kesuksesan dan kelangsungan korporat tersebut, terutama ketika terjadi suatu krisis. Adanya kesalahan dalam mengelola hubungan dengan stakeholder ketika terjadi krisis akan memberikan dampak buruk pada perusahaan atau organisasi atau korporat tersebut ⁴². Maka dapat dipahami bahwa korporat atau organisasi harus memikirkan para *stakeholder* nya demi keberlangsungan dan kesuksesan organisasi tersebut.

I.5.4 Definisi Peran

Berdasarkan KBBI peran memiliki arti sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di warga ⁴³. Menurut Sarwono (2015:215), *role theory* merupakan teori yang terdiri dari perpaduan berbagai teori, orientasi, ataupun disiplin ilmu. Dalam ketiga bidang ilmu psikolog, sosiologi, dan antropologi, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dimana dalam teater, seseorang aktor harus berkaca menjadi suatu tokoh tertentu dan dalam peran sebagai tokoh para aktor tersebut diminta untuk berperilaku secara tertentu ⁴⁴.

⁴² Yunus Handoko, "Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis" Jurnal JIBENKA, Vol. 8 No. 2, 2014.

⁴³ <https://kbbi.web.id/peran> (diakses pada 2 Agustus 2022)

⁴⁴ Sarwono. (2015). *Teori-Teori Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 215.

Dalam sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi, peran menjadi salah satu komponen didalamnya, sehingga dalam strategi dan struktur organisasi terbukti mempengaruhi *role perception*. Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status. Peran merupakan salah satu aspek interaksi sosial, seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dalam suatu badan hukum yang melakukan kegiatan perilaku atau menjalankan bisnis sesuai dengan statusnya⁴⁵. Pada dasarnya, peran juga dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku tertentu yang disebabkan oleh posisi atau jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana pemimpin atas, menengah, dan bawah akan berada dalam peran yang sama. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus dalam warga⁴⁶. Istilah peran dalam Soekanto mencakup tiga unsur penting, yaitu⁴⁷:

- a. Peran meliputi standar yang melekat pada posisi atau kedudukan seseorang dalam warga. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat diterapkan oleh individu dalam warga sebagai suatu organisasi.
- c. Peran juga dapat dianggap sebagai perilaku individu, yang memiliki implikasi penting bagi struktur sosial warga.

Hartono dan Hunt (1996:118) menunjukkan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan. Masing-masing individu atau kelompok warga yang berstatus diharapkan mampu memainkan peran sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, peran dan status merupakan dua aspek dari fenomena yang sama. Status merupakan seperangkat kewajiban dan hak-hak tersebut⁴⁸. Dalam buku "Perilaku Organisasi

⁴⁵ Soekanto. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Harton, Paul B., dan Chester L. Hunt. (1996). *Sosiologi, jilid 1 Edisi Keenam*, (Ahli Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Konsep Dasar dan Aplikasi" karya Miftah Thoha, menyatakan bahwa peranan menjadi suatu rangkaian yang muncul lantaran suatu jabatan. Jadi dapat diartikan bahwa peran merupakan suatu rangkaian aktivitas teratur yang disebabkan lantaran adanya suatu jabatan. Dimana hal tersebut kembali pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yakni mempunyai kecenderungan untuk hidup secara berkelompok. Kemudian dalam kehidupan berkelompok tersebut akan terjadi interaksi yang ditimbulkan antar anggota warga satu dengan yang lainnya. Sehingga dari adanya sebuah interaksi dapat menimbulkan suatu ketergantungan antar satu sama lain. Dengan adanya saling ketergantungan maka suatu peran tadi akan terbentuk⁴⁹. Dari pemaparan beberapa teori diatas mengenai peran, peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu tugas yang melekat pada diri seseorang baik itu secara individu maupun berkelompok yang menjadi jati diri atau identitas mereka dan harus dilaksanakan secara maksimal dan pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan hal diatas apabila dikaitkan dengan peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing para stakeholder yang terlibat dalam mengembangkan Desa wisata tersebut.

I.5.5 Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* merupakan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam suatu proyek, menilai kepentingan mereka serta cara kepentingan tersebut memengaruhi risiko dan kelangsungan dari suatu proyek⁵⁰. Redd et al⁵¹ mengemukakan bahwa metode yang dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan serta kekuatan para pihak atau *stakeholder* yaitu dengan cara :

1. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan

⁴⁹ Miftah Thoha, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Overseas Development Administration ODA, "Guidance note on stakeholder analysis for aid projects and programmes", 1995.

⁵¹ Mark S. Reed et al., "Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management," *Journal of Environmental Management*, Vol. 90 No. 5, 2009.

2. Mengategorikan atau mengelompokkan pemangku kepentingan
3. Menyelidiki hubungan antara para pemangku kepentingan

Bryson menyatakan bahwa analisis *stakeholder* digunakan untuk menghindari adanya kegagalan kebijakan karena pengambil kebijakan mampu mengetahui kepentingan serta informasi dari para *stakeholder* kunci, menghubungkan banyak pihak yang terlibat secara global sebagai aspek yang penting dalam pemecahan masalah serta membantu dalam kesuksesan pencapaian tujuan dengan memberikan kontribusi penting guna menciptakan nilai melalui fungsi dan dampak atau kegiatan dalam strategi pengelolaan ⁵².

I.5.5.1 Identifikasi Stakeholder

Identifikasi *stakeholder* merupakan suatu langkah untuk mencari serta mengetahui siapa saja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kebijakan, program maupun program utama. Maka, dalam penelitian ini *stakeholder* yang diidentifikasi yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Setelah *stakeholder* teridentifikasi, maka *stakeholder* akan dibedakan menjadi tiga jenis kelompok berdasarkan klasifikasi dari Overseas Development Administration (ODA) yaitu :

1. *Primary Stakeholder*

Stakeholder primer yaitu *stakeholder* yang memiliki keterkaitan secara langsung pada kepentingan suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan tertentu. Maka, dapat dipahami bahwa *stakeholder* primer merupakan *stakeholder* penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. *Stakeholder* primer terdiri dari : (a) Warga, dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu akan memiliki sebuah keadaan yang berubah, baik yang bersifat baik maupun buruk. Pada keadaan tersebut, warga akan terkena dampak atau terkena manfaat secara langsung dari suatu

⁵² John Bryson, “*What to do when stakeholders matter: A guide to stakeholder identification and analysis techniques Public and Nonprofit Strategic Management View project*”, National Public Management Research Conference, 2003.

kebijakan atau program. (b) Lembaga/badan publik, lembaga atau badan publik merupakan pihak yang bersifat sebagai manager publik yaitu pihak yang bertanggungjawab dalam pengambilan serta implementasi kebijakan.

2. *Secondary Stakeholder*

Stakeholder sekunder yaitu stakeholder yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap kepentingan suatu kebijakan, program, proyek maupun kegiatan tertentu tetapi memiliki pengaruh dikarenakan kehadirannya memiliki *concern* atau kepedulian antara sikap warga dan keputusan legal dari pemerintah. Stakeholder sekunder terdiri dari : (a) Lembaga/aparat pemerintah yang tidak mempunyai tanggung jawab langsung. (b) Lembaga/aparat pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan suatu keputusan. (c) Lembaga Swadaya Warga (LSM).

3. *Key Stakeholder*

Stakeholder kunci yaitu kelompok legal yang memiliki kewenangan secara langsung terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci antara lain yaitu unsur eksekutif sesuai dengan levelnya.

1.5.5.1.1 Identifikasi Peran Stakeholder

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu aspek dinamis kedudukan apabila individu melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki ⁵³. Menurut Koentjaraningrat peranan merupakan tingkah laku seseorang atau individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu ⁵⁴. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan.

Sebuah studi oleh Siagian (2003: 142) menyatakan bahwa pemangku kepentingan memainkan peran dominan dalam proses pembangunan ketika mereka

⁵³ Soerjono Soekanto. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

⁵⁴ Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi II Pokok-Pokok Entografi*. Jakarta: Rineka Cipta.

dikaitkan dengan program pembangunan yang dalam hal ini melibatkan pengembangan. Peran yang dimaksud adalah:

1. Modernisator

Sebagai modernisator, pemerintah membimbing warga menuju modernisasi dan bertindak memulai gaya hidup modern dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang tidak lagi sejalan. Melalui pembangunan, semua negara ingin menjadi negara yang kuat dan mandiri sehingga dapat diperlakukan sama oleh negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajemen, kemampuan mengolah sumber daya alam yang bernilai tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal sehingga dapat menghasilkan talenta produktif, landasan politik yang kuat dan demokratis, berorientasi pada masa depan karena memiliki visi yang jelas mengenai masa depan yang diinginkan.

2. Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah harus mampu memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi pembangunan negara. Kendalikan faktor-faktor negatif yang cenderung menjadi hambatan sehingga dapat meminimalisir dampaknya. Meminimalkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong laju pembangunan nasional agar dapat memaksimalkan manfaatnya.

3. Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan sebagai pengarah dan pengayom bagi warga, bertujuan agar sikap, perilaku, dan cara kerja yang baik dapat dijadikan panutan oleh warga dalam melaksanakan pembangunan.

4. Stabilisator

Peran pemangku kepentingan merupakan membawa perubahan yang tidak menimbulkan gejolak sosial, terutama yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan persatuan serta kesatuan bangsa. Peran ini dapat dicapai dengan berbagai cara, antara lain seleksi tinggi, proses sosialisasi

yang elegan namun efektif, edukasi, dan pendekatan yang tepat. dimana dengan pendekatan yang menarik dan bertahap namun tetap berkesinambungan.

5. Pelopor

Sebagai pelopor, pemangku kepentingan perlu menjadi panutan bagi warga luas. Dalam bentuk hal-hal positif seperti pelopor karya yang paling produktif, pelopor keadilan dan disiplin, pelopor kepedulian lingkungan, budaya dan sosial, dan pelopor dalam pengorbanan untuk bangsa.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian, Menurut Nugroho et al.⁵⁵ terdapat peran *stakeholder* yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Policy Creator*

Policy creator merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan serta penentu dalam suatu kebijakan. *Policy creator* memiliki peran utama dalam membuat suatu kebijakan serta mengevaluasinya. Suatu kebijakan tentu berfungsi sebagai pedoman dalam berjalannya suatu program, Maka, melalui kebijakan program, *stakeholder* dalam kelompok *policy creator* dapat menciptakan lingkungan yang stabil serta kondusif bagi suatu program.

2. *Coordinator*

Coordinator merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mengkoordinasikan *stakeholder* yang lainnya yang terlibat dalam suatu kebijakan. *Stakeholder* dalam kelompok ini diharapkan dapat menghubungkan antar sumber -sumber strategis yang saling terkait guna kelancaran dari suatu kebijakan atau program.

⁵⁵ Nugroho Hermawan Cahyo, Soesilo Zuhar, dan Suryadi, “Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitas di Kabupaten Nganjuk”, Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari, Vol. 5 No. 1, 2014.

3. Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mencukup serta memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. *Stakeholder* dalam kelompok ini dituntut untuk dapat mengantarkan suatu kebijakan atau program kepada kelompok sasaran dengan memberikan suatu pelayanan teknis, material hingga intelektual.

4. *Implementor*

Implementor merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sebagai pelaksana dari kebijakan yang didalamnya juga termasuk kelompok sasaran. *Stakeholder* dalam kelompok ini memiliki tanggungjawab sebagai garda terdepan dalam membawa suatu program pada arah yang telah ditentukan melalui cara atau langkah yang sesuai dengan suatu ketentuan yang sebelumnya telah disepakati.

5. Akselerator

Akselelator merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempercepat serta memberikan kontribusi gar suatu program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan atau bahkan lebih cepat dari waktu pencapaiannya.

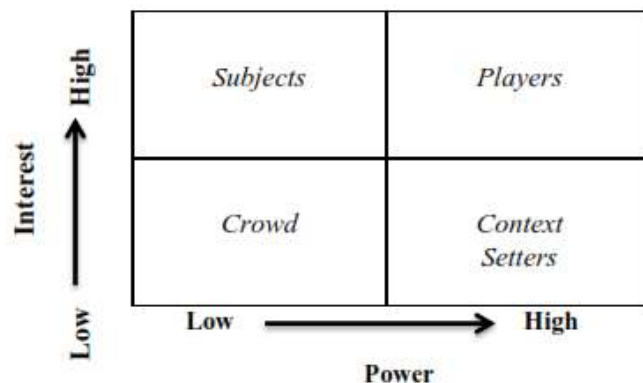
Berdasarkan temuan yang ada di lapangan disertai dengan keberadaan *stakeholder* pada Desa Wisata Lontar Sewu , peneliti menganggap teori yang tepat digunakan yakni teori dari Herman Cahyo Nugroho et al.,

I.5.5.2 Pemetaan Stakeholder

Stakeholder mapping merupakan suatu perangkat dalam bisnis yang berguna untuk mengidentifikasi dan menilai dampak dari seorang individu maupun kelompok *stakeholder* perusahaan terhadap perusahaan. Perangkat bisnis ini menilai power yang dimiliki oleh stakeholder, kemungkinan digunakannya power tersebut, dan tingkat interest yang dimiliki stakeholder terhadap perusahaan (Johnson and Scholes, 2002). Pemetaan *stakeholder* adalah rangkaian kegiatan seperti pengumpulan data tentang pemangku kepentingan, pengolahan dan analisis data, penentuan klasifikasi pemangku kepentingan, penetapan strategi, serta

perumusan berbagai pendekatan dan agenda program yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan tersebut ⁵⁶. Pemetaan *stakeholder* merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui penilaian dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat karena setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda sesuai dengan tupoksinya.

Dalam penelitian ini melakukan kategorisasi atau mengklafisikasikan *stakeholder* menggunakan matriks yang disusun oleh Fran Ackerman dan Colin Eden ⁵⁷. Fran Ackerman dan Colin Eden mengkategorikan serta mengklasifikasi *stakeholder* dengan matriks dua kali dua dimana didalamnya terdapat kuadran atau kelompok yang dipetakan sesuai dengan *interest* atau kepentingan dalam suatu kebijakan, program atau kegiatan serta power atau kekuatan yang dimiliki dalam mempengaruhi kebijakan, program atau kegiatan tersebut. Berikut merupakan matriks atau kuadran power vs interest Eden & Ackerman :



Gambar 1.1 Kuadran Analisis Power dan *Interest Stakeholder*

Sumber: (Fran Ackermann and Colin Eden, 2011)

Dalam gambar 1.1 tersebut, setiap posisi memiliki makna atau maksud tersendiri sesuai dengan tingkat kepentingan serta kekuatan atas peran dari masing-

⁵⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Lingkungan Instansi Pemerintah

⁵⁷ Fran Ackerman dan Colin Eden, “*Strategic Management of Stakeholders: Theory abd Practice*”, Long Range Planning, Vol. 44 No. 3, 2011.

masing *stakeholder* yang ada. Berikut merupakan penjelasan dari pemetaan tersebut:

1. *Subjects*

Subject merupakan *stakeholder* yang memiliki kekuatan lemah namun memiliki kepentingan yang tinggi. *Stakeholder subject* mungkin dapat berpengaruh jika membentuk suatu aliansi dengan *stakeholder* yang lainnya. Yang potensial yang tinggi atas terwujudnya suatu kebijakan.

2. *Crowd*

Crowd merupakan *stakeholder* yang memiliki kekuatan lemah serta memiliki tingkat kepentingan yang lemah pula. Keberadaan *stakeholder* pada kategori ini sebetulnya mempengaruhi hasil yang diharapkan namun dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan. *Stakeholder crowd* dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

3. *Players*

Players merupakan *stakeholder* yang memiliki kekuatan tinggi serta memiliki tingkat kepentingan yang tinggi pula. *Stakeholder* dalam kategori ini bersifat aktif terlibat dalam pelaksanaan atau berjalannya suatu kebijakan.

4. *Context setter*

Context setter merupakan *stakeholder* yang memiliki kekuatan tinggi, namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah. Maka dari itu, *stakeholder* pada *context setter* memiliki risiko yang tinggi serta harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.

1.5.5.2.1 Derajat Kepentingan

Interest atau kepentingan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perhatian dari pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan/program bekerja⁵⁸. Dalam penelitian ini kepentingan dari para pemangku kepentingan akan dikategorikan menjadi kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Tingkat kepentingan dalam

⁵⁸ P. Ondee dan S. Pannarunothai, "Stakeholder Analysis: Who are the Key Actors in Establishing and Developing Thai Independent Consumer Organization, International Journal of Human and Social Sciences, Vol. 3 No. 4, 2008.

penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi rendah, sedang serta tinggi dengan menggunakan kriteria dari ODA ⁵⁹, Grimble ⁶⁰, Eden dan Ackerman ⁶¹ dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Tinggi : *Stakeholder* memiliki harapan, aspirasi serta manfaat potensial yang tinggi akan terwujudnya kebijakan/program.
- Sedang : *Stakeholder* memiliki harapan serta aspirasi, namun *stakeholder* tidak menerima manfaat potensial secara langsung atas terwujudnya suatu kebijakan/program.
- Rendah : *Stakeholder* tidak memiliki harapan, aspirasi serta manfaat potensial atas terwujudnya suatu kebijakan/program.

1.5.5.2.2 Derajat Kekuatan

Power atau kekuatan dapat didefinisikan sebagai sumber daya serta kewenangan hukum yang dimiliki oleh pemangku kepentingan serta kemampuannya dalam mengakses serta memobilisasi sumber daya guna merumuskan dan melaksanakan kebijakan ⁶². Tingkat kekuatan dalam penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi rendah, sedang serta tinggi dengan menggunakan kriteria dari ODA ⁶³, Grimble ⁶⁴, dan Eden dan Ackermann ⁶⁵ dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Tinggi : *Stakeholder* memiliki kewenangan yang penuh dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi, evaluasi serta mempengaruhi pihak lain dalam pembuatan kebijakan/program.

⁵⁹ ODA, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Robin Grimble. (1998). “*Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management*. UK: Natural Resource Institute.

⁶¹ Ackerman dan Edden, *Loc.Cit.*

⁶² P. Ondee dan S. Pannarunothai, *Loc.Cit.*

⁶³ ODA, *Loc.Cit.*

⁶⁴ Grimble, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Ackerman dan Edden, *Loc.Cit.*

- Sedang : *Stakeholder* memiliki kewenangan yang terbatas dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi, evaluasi serta mempengaruhi pihak lain dalam pembuatan kebijakan/program.
- Rendah : *Stakeholder* tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi, evaluasi serta mempengaruhi pihak lain dalam pembuatan kebijakan.

I.5.5.3 Hubungan Antar Stakeholder

Hubungan antar *stakeholder* merupakan sifat saling ketergantungan antar satu sama lain terkait dengan kepentingan masing-masing sebagai suatu sistem yang berfungsi ⁶⁶. Dalam melakukan analisis terkait hubungan *stakeholder*, penelitian ini menggunakan metode *actor-linkage matrices* sebagaimana mengacu pada jurnal Reed et al. ⁶⁷Metode tersebut mengharuskan para *stakeholder* untuk dicantumkan dalam baris serta kolom tabel sehingga keterkaitan antar *stakeholder* dapat dijelaskan. Hubungan antar para *stakeholder* dilihat apakah para *stakeholder* berkonflik, saling melengkapi atau kerjasama.

1. Konflik

Konflik merupakan suatu fenomena yang akan selalu muncul dalam kehidupan warga sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari serta terus terjadi ⁶⁸. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin sebagaimana dikutip Nulhaqim et al. menyatakan bahwa istilah konflik (*conflict*) di dalam bahasa aslinya memiliki arti suatu “perkelahian, peperangan atau perjuangan” yang berupa konfrontasi fisik yang terjadi antara beberapa pihak. Lebih lanjut, Webster mengemukakan bahwa konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi dari para pihak yang

⁶⁶ Bambang Rudito dan Melia Famiola. (2013). *CSR Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains.

⁶⁷ Mark S. Reed et al., *Loc. Cit.*

⁶⁸ Soni A Nulhaqim et al., (2020). *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

berkonflik tidak mampu dicapai secara stimulan ⁶⁹. Maka, dapat dipahami bahwa konflik merupakan adanya persepsi dari suatu pihak terkait dengan adanya perbedaan kepentingan yang bertentangan dengan pihak lain.

2. Kerja sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu ⁷⁰. Maka, dapat disimpulkan bahwa kerja sama merupakan suatu usaha antar beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama.

I.5.6 Pengembangan Desa Wisata

I.5.6.1 Pengembangan

Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti "bertambah sempurna" kemudian kata kembang tersebut mendapat imbuhan pe- dan an pada awal dan akhir kata tersebut. Jika digabungkan maka menjadi kata pengembangan yang memiliki arti suatu proses, tindakan, atau cara untuk menyempurnakan suatu tujuan yang diinginkan agar lebih dari tujuan sebelumnya ⁷¹. Seels & Richey membuat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembangan berarti proses menggambarkan secara konkrit suatu rancangan secara fisik, dalam fitur fisik ⁷². Pandangan Seel dan Richey juga didukung oleh Swarbrooke (1996) sebagaimana dikutip dalam Silitonga & Anom ⁷³ yang menyatakan pengembangan memberikan integrasi dalam penggunaan sumber daya yang beragam yang mengintegrasikan segala bentuk aspek yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembangunan itu sendiri. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Alkadri, pengembangan adalah kemampuan yang bergantung pada apa yang dapat dilakukan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Soekanto. *Loc.Cit.*

⁷¹ <https://kbbi.web.id/perkembangan> (diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 02.05 WIB)

⁷² Seels, Barbara B. & Richey, Rita C. (1994). *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ

⁷³ Samuel Saut Marihot Silitonga dan I Putu Anom, "Kota Tua Barus Sebagai Daerah Tujuan Wisata Sejarah Di Kabupaten Tapanuli Tengah", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 4 No. 2, 2016.

untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan sama dengan memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan dan kemampuan untuk melakukannya ⁷⁴. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengembangan adalah proses tindakan atau metode yang ditujukan untuk mencapai keterpaduan dalam penggunaan sumber daya dan keinginan untuk memperbaiki keadaan dengan cara yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan tidak dapat dianggap sebagai suatu hal biasa karena pengembangan Desa wisata merupakan bagian dari proses pembangunan.

I.5.6.2 Desa Wisata

Desa memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata yang berakar pada daerahnya, berlandaskan kearifan budaya daerahnya, dan juga dapat mengkatalisasi pembangunan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berkelanjutan. Dimana hal tersebut sesuai dengan konsep membangun untuk kemakmuran dari pinggiran atau dari Desa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga dengan menggali potensi lokal kemudian memberdayakan warganya sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah sebagai program utama dari Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa memiliki hak tradisional dalam asal usul dan pengaturannya. Melindungi kepentingan komunitas lokal dan berkontribusi pada realisasi cita-cita kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masing - masing pemerintah tingkat Desa memiliki otonomi untuk mengelola potensi yang dimiliki serta pembangunannya. Dalam pengelolaan Desa wisata kearifan lokal menjadi roh utama didalamnya. Nilai keunikan budaya maupun tradisi yang dimiliki oleh warga dapat mewujudkan nilai kearifan lokal dalam warga. Selain itu, nilai otentik yang sudah berada sejak lama dalam budaya masyarakat serta

⁷⁴ Kakambong Alamanda Debbyna, "*Studi Deskriptif Tentang Multiplier Effect Pengembangan Kawasan Industri Ngoro Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Warga desa Lolawang Kabupaten Mojokerto*", Kebijakan dan Manajemen, Vol. 4 No. 1, 2016.

kredibilitas nilai-nilai tradisional yang muncul tidak hanya secara lokal tetapi juga di warga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa wisata tersebut ⁷⁵.

1.5.6.2.1 Pengertian Desa Wisata

Desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, ataupun istilah yang lain) merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan serta keunikan daya tarik wisata yang khas yakni merasakan pengalaman keunikan kehidupan serta tradisi warga di perDesa an dengan seluruh potensinya ⁷⁶. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pengembangan pariwisata yang berbasis warga dan berkelanjutan. Desa wisata adalah suatu bentuk pariwisata, di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di Desa -Desa terpencil dan belajar tentang kehidupan Desa dan lingkungan setempat ⁷⁷. Kemudian terdapat definisi Desa wisata menurut Wiendu Nuryanti (1993) Desa wisata merupakan perpaduan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas dukungan yang terwujud dalam struktur kehidupan warga yang mencerminkan tata cara dan tradisi yang berlaku. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa wisata merupakan suatu wujud antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas di sebuah kawasan yang disertai kemampuan serta keunikan daya tarik wisata yang khas yakni merasakan pengalaman keunikan kehidupan serta tradisi warga di perDesa an dengan seluruh potensinya.

Mengenai konsep pengembangan Desa wisata, pengembangan Desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan pada cara mengembangkan atau mempromosikan Desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan Desa wisata diartikan sebagai upaya melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan ⁷⁸.

⁷⁵ Kementerian Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, hal 29.

⁷⁶ *Ibid.*, hal 29.

⁷⁷ Edward Inskeep dan Van Nostrand Reinhold, “*Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*”, Journal of Travel Research, Vol. 31 No. 4, 1993.

⁷⁸ Pearce D G and others, “*Tourism today: a geographical analysis*”, Longman scientific & technical, 1995.

Desa wisata sebagai salah satu bentuk Desa wisata dapat memberikan banyak manfaat bagi upaya pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah peDesa an ⁷⁹. Potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan dan sekaligus memberikan peluang bagi warga lokal untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui pariwisata. Pengembangan Desa wisata dengan demikian dapat menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan lokal, diversifikasi produk pariwisata, menopang perekonomian warga lokal, dan merevitalisasi budaya lokal. Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan Desa wisata disinyalir mampu mengatasi urbanisasi dan mendorong perekonomian peDesa an. Selain itu, Desa wisata berperan dalam meningkatkan kualitas hidup warga peDesa an. Sebagai salah satu bentuk wisata alternatif, Desa wisata dapat menjadi sarana yang potensial untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan ⁸⁰. Dimana terdapat komponen Desa wisata meliputi: (1) atraksi atau disebut juga dengan daya tarik wisata, di Desa adalah seluruh kehidupan sehari-hari penduduk beserta kondisi fisik lokasi Desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif; (2) fasilitas, adalah sumber daya yang dibuat khusus karena wisatawan sangat membutuhkannya dalam kegiatannya di Desa Wisata. Fasilitas tersebut dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki Desa atau membuat sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan tetapi tidak meninggalkan ciri khas dan keunikan Desa ⁸¹.

Adapun kriteria yang dimiliki Desa wisata yang dapat dilihat sebagai berikut ⁸²: a. memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif); b. memiliki komunitas warga; c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa wisata; d. memiliki kelembagaan pengelolaan; e. memiliki peluang dan dukungan

⁷⁹ Suhardjo A J. (2008). *Geografi PeDesa an Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Ideas Media.

⁸⁰ N S Arida, A Suryasih, dan G N Parthama, “*Model of Community Empowerment in Tourism Village Development Planning in Bali*”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 313, 2019.

⁸¹ I Putra et al., “*The Study on Village Tourist Potential Exploration in Karangasem Regency*”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 544, 2021.

⁸² Kementerian Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, *Loc.Cit.*, hal 29.

ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan. Desa wisata dapat terdiri dari beberapa Desa yang letaknya berdekatan sehingga dapat mengintegrasikan sebuah wisata berbasis peDesa an yang menunjukkan Desa wisata berfokus pada *sense* yang ditimbulkan ketika pengunjung memasuki Desa wisata tersebut ⁸³. Dari pemaparan yang diambil dari beberapa sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga setempat atau pihak lainnya yang berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa tersebut untuk dikelola atau dikembangkan menjadi tempat pariwisata sehingga dapat menjadi sumber pemasokan bagi Desa tertentu karena dapat menunjukkan daya tarik Desa wisata.

I.5.6.3 Jenis Desa Wisata

Dalam buku “Pedoman Desa Wisata” yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi ⁸⁴ terdapat empat (4) jenis wisata yang dapat menjadi acuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam
yakni Desa wisata yang memiliki daya tarik potensi alam seperti danau, lembah, sungai, pantai, dan berbagai bentuk bentang alam unik lainnya.
- b. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal
yakni Desa wisata yang memiliki daya tarik terkait adat tradisi dan kehidupn keseharian warga, seperti aktivitas mata pencaharian, religi, dan sebagainya.
- c. Desa Wisata Kreatif
yakni Desa wisata yang memiliki daya tarik terkait aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga warga lokal, seperti aktivitas kesenian dan kerajinan yang khas.

⁸³ *Ibid.*, hal 29.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 30.

d. Desa wisata berbasis kombinasi

yaitu Desa wisata yang menggabungkan daya tarik wisata bisa antar satu obyek maupun lebih , seperti mengkombinasikan potensi alam, budaya, dan kreatif.

1.5.6.3.1 Tipe Desa Wisata

Dalam buku yang berjudul “Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal” karya Made Antara dan Sukma Arida, dijelaskan mengenai tipe Desa wisata yang diklasifikasikan menurut pola, proses dan tipe pengelolanya, Desa atau kampung wisata di Indonesia terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka ⁸⁵.

a. Tipe Terstruktur/daerah kantong (*enclave*), tipe ini ditandai dengan:

- 1) Lahan terbatas dengan infrastruktur khusus kawasan. Tipe ini dapat menembus pasar internasional karena keunggulannya dalam mengembangkan citra.
- 2) Lokasi yang secara umum terisolasi dari warga setempat, yang diharapkan dapat menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, dapat mendeteksi pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan sejak dini.
- 3) Lahan yang tidak terlalu besar sehingga dapat membuat perencanaan secara integratif dan terkoordinasi dan diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkan servis-servis dari hotel berbintang.

b. Tipe terbuka (*spontaneous*), yang ditandai dengan ciri-ciri pertumbuhan dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik dalam ruang maupun dalam pola dengan warga. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari wisatawan di distribusikan langsung sehingga dapat dinikmati oleh warga sekitar. Namun terdapat dampak negatif yakni penyebarannya yang cepat di antara penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan.

⁸⁵ Made Antara dan Sukma Arida. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Denpasar: Konsorsium Riset Pariwisata (KRP) Universitas Udayana, hal 10.

1.5.6.3.2 Kriteria Desa Wisata

Dalam buku yang berjudul “Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal” karya Made Antara dan Sukma Arida ⁸⁶, mengemukakan bahwa suatu Desa memerlukan kriteria tertentu untuk dapat menjadi Desa wisata. Kriteria tersebut bertujuan untuk melihat karakteristik utama dari suatu Desa , yang meliputi:

- a. Atraksi wisata, yakni segala sesuatu yang meliputi alam, budaya, dan buatan manusia. Atraksi yang paling menarik dan atraktif di Desa akan menjadi atraksi yang terpilih.
- b. Jarak Tempuh, yakni titik tempuh dari destinasi wisata pada tempat tinggal wisatawan serta titik tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
- c. Besaran Desa , yakni kriteria yang berkaitan dengan daya dukung pariwisata pada suatu Desa , termasuk didalamnya terkait masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah Desa .
- d. Sistem Kepercayaan dan kewargaan, yaitu aturan-aturan khusus pada komunitas sebuah Desa yang menjadi aspek penting, seperti mengenai agama mayoritas serta sistem kewargaan yang berlaku.
- e. Ketersediaan Infrastruktur, yakni sarana prasarana meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, ketersediaan listrik, air bersih, *drainase*, jaringan telepon, dan lainnya.

1.5.6.3.3 Komponen Produk Desa Wisata

Cooper, Flecher, Gilbert, dan Wanhill (1993) ⁸⁷ mengembangkan model “*Four A*” untuk menganalisis penawaran destinasi wisata diantaranya:

- a. *Attraction*

Merupakan produk unggulan dari destinasi wisata dan berkaitan dengan apa yang harus dilihat dan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, atraksi dapat berupa keindahan dan keunikan alam, budaya warga, peninggalan sejarah, dan wisata buatan seperti arena bermain dan hiburan. Tingginya

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 27.

⁸⁷ Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S.(1993). *Tourism: Principles and practice*. Harlow: Longman Scientific & Technical.

nilai diferensiasi, unik, dan berbeda dari wisata lainnya menjadi keharusan bagi sebuah atraksi. Berikut terdapat beberapa macam atraksi yang dapat dikembangkan di Desa wisata antara lain: (1) kegiatan kesenian Desa , (2) kegiatan upacara, (3) kegiatan persawah/ladangan, (4) kegiatan olah raga dengan warga desa , (5) kegiatan pembangunan rumah, (6) kegiatan mediasi lainnya, (7) kegiatan Desa adat lainnya, (8) kuliner.

b. *Accessibility*

Merupakan sarana dan prasarana untuk menuju ke Desa wisata. Sebuah destinasi wisata menjadikan akses jalan raya, ketersediaan transportasi dan petunjuk jalan sebagai aspek yang penting. Sebenarnya banyak daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam dan budaya yang layak dijual kepada wisatawan, namun tidak mudah dijangkau. Oleh karena itu, jika diperkenalkan dan dijual, wisatawan tidak banyak yang tertarik. Diperlukan juga perhatian dalam ketersediaan sarana transportasi, karena apabila hanya memperhatikan akses jalan yang baik tidak cukup membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut.

c. *Amenity*

Merupakan fasilitas penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan wisatawan saat menginap di tempat wisata, dan mengacu pada fasilitas akomodasi, restoran, dan tempat makan yang ada di dalam Desa wisata. Kebutuhan lain yang mungkin diperlukan wisatawan, seperti toilet umum, tempat istirahat, tempat parkir, klinik dan tempat ibadah, juga harus tersedia di tempat tujuan. Selain itu, fasilitas tersebut harus dinilai dengan melihat kondisi dan kondisi destinasi itu sendiri serta kebutuhan wisatawan.

d. *Ancillary*

Merupakan sesuatu hal yang mengacu pada ketersediaan organisasi atau pihak yang mengelola Desa . Hal tersebut menjadi penting adanya, apabila Desa wisata sudah memiliki atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas yang bagus namun tidak disertai dengan organisasi sebagai pengatur dan pengelola, dapat dipastikan Desa wisata tersebut akan terbengkalai

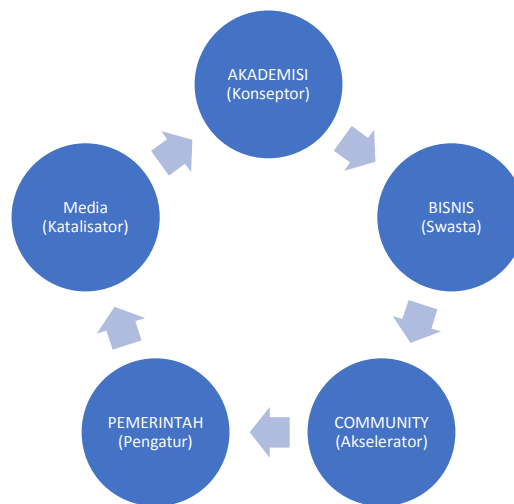
kedepannya. Maka dari itu, diperlukan dari stakeholder lainnya dalam mengelola Desa wisata.

Model “*Four A*” yang sudah dijelaskan di atas harus diperhatikan oleh warga desa , pemerintah atau pemangku kepentingan pariwisata untuk mengembangkan kawasan wisata menjadi Desa wisata yang menarik.

I.5.6.4 Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa wisata merupakan pengembangan terpadu yang disertai dengan kolaborasi antar lima elemen kunci pentahelix, yang terdiri dari warga, (komunitas/lembaga sosial), pemerintah, industri, akademisi, dan media sebagai katalisator ⁸⁸.

Bagan 1.6 Model Pentahelix Stakeholder



Sumber: Kementerian Desa Wisata PDTT (2022)

a. Akademisi

Stakeholder yang memiliki peran sebagai konseptor bertujuan untuk berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan serta melakukan standarisasi proses bisnis dan sertifikasi produk dan keterampilan sumber daya manusia.

⁸⁸ Kementerian Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, *Loc.Cit.*, hal. 32.

b. Bisnis

Pelaku usaha yang berperan sebagai enabler yang menyediakan dan memungkinkan fasilitas dan kualitas untuk kemajuan perekonomian daerah serta dapat membantu pengembangan pariwisata lebih efektif, efisien, dan produktif.

c. Komunitas

Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pelaku, penggerak, dan penghubung dalam keseluruhan proses pengembangan pariwisata, dan berperan sebagai akselerator.

d. Pemerintah

Pemangku kepentingan yang berperan sebagai regulator sekaligus kontroler yang memiliki peraturan dan bertanggung jawab mengembangkan pariwisata. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, promosi, pendanaan, perizinan, program, hukum, Pengembangan dan Pengetahuan, Kebijakan Inovasi Publik, Dukungan Jaringan Inovasi dan kemitraan.

e. Media

Media bertindak sebagai penyedia informasi, pendidikan, penghibur, dan sebagai pengontrol sosial. Media merupakan suatu kegiatan promosi meliputi kegiatan periklanan, penjualan, publisitas, informasi dari mulut ke mulut, dan pemasaran langsung yang memainkan peran yang kuat dalam mempromosikan dan menciptakan citra merek.

1.5.6.4.1 Arah dan Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa wisata memerlukan perencanaan yang baik agar dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian di lingkungan peDesa an. Terciptanya fungsi dan intensitas sebagai ruang peruntukkan lahan di peDesa an dalam meningkatkan tujuan wisata, memandu pengembangan Desa wisata, pembangunan secara fisik maupun non fisik dalam pengembangan Desa wisata. Sehingga dapat dilihat arah dari pengembangan Desa wisata meliputi optimalisasi fungsi kawasan peDesa an sebagai kawasan wisata, penguatan peran Desa wisata sebagai area

publik yang mengedepankan keselarasan antara lingkungan, edukasi, dan ekonomi, serta menggalakkan kegiatan di kawasan peDesa an dalam kegiatan rekreasi serta ragam kegiatan wisata peDesa an lainnya ⁸⁹. Pemerintah mengembangkan Desa wisata bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan warga, mengentas kemiskinan, memberantas pengangguran, melindungi alam, dan sumber daya, serta memajukan bangsa, sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan. Pembangunan Desa wisata juga merupakan bentuk percepatan pembangunan Desa terpadu untuk memfasilitasi transformasi sosial, budaya dan ekonomi Desa . Oleh karena itu, setiap daerah atau Desa harus memperhatikan potensinya untuk diangkat dan dikembangkan guna memberikan nilai tambah dan mencapai produktivitas yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan warga ⁹⁰.

1.5.6.4.2 Manfaat Pengembangan Desa Wisata

Dalam buku “Pedoman Desa Wisata” yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT ⁹¹ terdapat beberapa manfaat dalam pengembangan Desa wisata, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dapat menjaga taraf hidup warga maju dan melestarikan budaya serta tradisi.

Pengembangan Desa sebagai Desa wisata tentunya bermanfaat secara langsung melalui dampak positif terhadap taraf hidup warga, yakni terciptanya lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan kualitas hidup warga peDesa an, melalui keberadaan Desa wisata di suatu Desa tertentu.

- b. Manfaat perekonomian bagi warga.

Keberadaan suatu Desa wisata di Desa tertentu dapat mempengaruhi perekonomian di Desa .

⁸⁹ Rara Sugiarti, Istijabatul Aliyah, dan Galing Yudana, “Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ngawi”, Cakra Wisata, Vol. 12 No. 2, 2016

⁹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "*Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*", Siaran Pers, HM.4.6/458/SET.M.EKON.3/12/2021, 2021

⁹¹ Kementerian Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, *Loc.Cit.*, hal. 44.

- c. Meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah.

Memanfaatkan produk lokal sebagai bahan baku yang digunakan dalam industri kecil maupun menengah sehingga dapat meningkatkan industri tersebut.

- d. Promosi produk lokal

Pengembangan Desa sebagai Desa wisata dapat dijadikan sarana sebagai promosi produk lokal dengan memanfaatkan potensi alam dan produk lokal yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan.

1.5.6.4.3 Kategori Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa wisata dapat dibagi menjadi empat kategori yakni rinitisan, berkembang, maju dan mandiri. Penetapan klasifikasi (atau peruntukan lain) Desa wisata dapat dilakukan paling lambat dua tahun oleh perangkat Desa dan OPD yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dan pemberdayaan warga desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penghitungan dan penilaian penetapan klasifikasi Desa wisata Indonesia diatur tersendiri dalam pedoman teknis penetapan klasifikasi Desa wisata ⁹².

1. Rinitisan

Menentukan klasifikasi Desa wisata rinitisan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Masih ada potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata; b) Pembangunan infrastruktur pariwisata masih terbatas; c) Hanya sedikit wisatawan yang datang dari warga sekitar; d) Dengan kata lain, kesadaran warga akan potensi pariwisata belum meningkat; e) Diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta); f) Penggunaan dana Desa untuk pengembangan Desa wisata; g) Pengelolaan Desa liburan masih bersifat lokal Desa.

2. Berkembang

Menentukan klasifikasi Desa wisata yang sedang dikembangkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Dikenal dan dikunjungi warga

⁹² *Ibid.*, hal. 42.

sekitar dan pengunjung diluar jangkauan; b) Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; c) Dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi bagi warga.

3. Maju

Penentuan klasifikasi Desa wisata maju berdasarkan kriteria berikut: a) Warga menyadari sepenuhnya potensi pariwisata termasuk pengembangannya; b) Menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan secara domestik maupun mancanegara; c) Sarana dan prasarana sudah memadai; d) Warga memiliki kemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui Pokdarwis/Pokja setempat; e) Warga dapat menggunakan dana Desa untuk mengembangkan Desa wisata; f) Sistem pengelolaan Desa wisata untuk meningkatkan perekonomian warga Desa dan mempengaruhi pendapatan asli Desa .

4. Mandiri

Penetapan klasifikasi Desa mandiri berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Pemkot telah membawa inovasi untuk mengembangkan potensi pariwisata (diversifikasi produk) Desa sebagai wirausaha mandiri; b) Menjadi destinasi wisata terkenal di luar negeri dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui secara global; c) Sarana dan prasarana memenuhi standar minimum internasional ASEAN; d) Pengoperasian Desa wisata dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, dan Pentahelix berjalan dengan baik; e) Pendanaan Desa merupakan bagian penting dalam mengembangkan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa wisata; f) Desa dapat menggunakan digitalisasi sebagai bentuk periklanan mandiri (melalui digitalisasi dan teknologi dapat membuat materi promosi dan memasarkannya secara mandiri).

1.5.7 Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa wisata menjadi salah satu bentuk percepatan pembangunan Desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi Desa . Dalam mengembangkan pariwisata terdapat faktor-faktor yang mendukung diantaranya Sumber daya alam, sumber daya manusia, biaya atau

keuangan, warga, pihak swasta, kebijakan pemerintah, organisasi dan lembaga warga⁹³. Clare A. Gunn dalam bukunya yang berjudul *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases* sebagaimana dikutip dalam Wahyuni, menyatakan bahwa dalam pengembangan Desa wisata tidak hanya berdasar oleh faktor pendukung pariwisata tetapi dibutuhkan juga kerjasama antar instansi maupun lembaga yang terlibat dalam pengembangan wisata tersebut yang berorientasi pada tujuan⁹⁴. Keberadaan pengembangan pariwisata dalam hal ini ialah Desa wisata membutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama, sesuai yang dikemukakan oleh Claire A. Gunn, pembangunan suatu wisata diperlukan kerjasama antar beberapa sektor diantaranya, sektor publik, privat, dan masyarakat lokal dengan harapan kepentingan stakeholder dapat dipenuhi⁹⁵. Kemudian, Mansyar Abdul juga menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan suatu wisata dapat dilakukan dengan cepat serta dapat menekan penggunaan dana anggaran pemerintah apabila dilakukan kerjasama antara swasta dan warga⁹⁶. Selain itu, *stakeholders* juga memiliki peran dalam pengembangan pariwisata yakni sebagai pihak yang membuat pedoman dan rencana yang sistematis. Kemudian membentuk ketentuan dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata serta upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata⁹⁷.

Maka dari itu, keberhasilan suatu pengembangan Desa wisata tidak hanya berasal dari satu peran pemangku kepentingan akan tetapi, agar dapat tercapai juga harus disertai dengan kerjasama antar stakeholder seperti pemerintah, warga, swasta, dan pihak lainnya. Hal inilah yang menjadikan peneliti ingin melakukan

⁹³ Islamiyah Wahyuni, “*Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kabupaten Jombang*”, Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.6 No.3, 2018.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Marcella Hidayat, “*Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Camis Jawa Barat)*”, Journal Tourism And Hospitality Essentials (The), Vol. 1, No. 1, 2011.

⁹⁶ Arviana Irmadella. (2017). Model Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Bungkul Kota Surabaya. Skripsi. Universitas Airlangga Hlm. 82

⁹⁷ Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini, “*Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*”, E-Journal Undip, 2022.

penelitian terkait bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan wisata Lontar Sewu Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

I.6 Definisi Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menyusun definisi konsep dalam penelitian ini. Definisi konsep disusun untuk memberikan gambaran dan batasan dalam fokus penelitian. Dengan demikian konsep dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- A. Pemetaan *stakeholder* merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui penilaian dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat karena setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda sesuai dengan tupoksinya.
- B. Peran merupakan suatu tugas yang melekat pada diri seseorang baik itu secara individu maupun berkelompok yang menjadi jati diri atau identitas mereka dan harus dilaksanakan secara maksimal dan pada tempat yang seharusnya.
- C. *Stakeholder* merupakan suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan serta ketertarikan pada sesuatu baik pada suatu kegiatan maupun kebijakan.
- D. *Policy Creator* merupakan pemangku kepentingan yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.
- E. Koordinator merupakan pemangku kepentingan yang berperan untuk mengkoordinasikan satu *stakeholders* dengan yang lainnya.
- F. Fasilitator merupakan pemangku kepentingan yang berperan sebagai pemberi atau penyedia fasilitas dan mencukupi kebutuhan dari kelompok sasaran
- G. Implementer merupakan pemangku kepentingan yang berperan sebagai pelaksana kebijakan
- H. Akselerator merupakan pemangku kepentingan yang berperan dalam memberikan kontribusi dan mempercepat suatu program agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran.

- I. Peran *Stakeholder* adalah Pihak yang berperan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan individu atau organisasi terkait dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian atau perhatian dan yang mempengaruhi dan mungkin dipengaruhi oleh kegiatan, kebijakan, dan tujuan organisasi.
- J. Pengembangan adalah proses tindakan atau metode yang ditujukan untuk mencapai keterpaduan dalam penggunaan sumber daya dan keinginan untuk memperbaiki keadaan dengan cara yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak dapat dianggap sebagai suatu hal biasa karena pengembangan Desa wisata merupakan bagian dari proses pembangunan.
- K. Desa wisata merupakan suatu wujud antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas di sebuah kawasan yang disertai kemampuan serta keunikan daya tarik wisata yang khas yakni merasakan pengalaman keunikan kehidupan serta tradisi warga di perDesa an dengan seluruh potensinya.
- L. Pengembangan Desa wisata merupakan menjadi salah satu bentuk percepatan pembangunan Desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi Desa yang disertai dengan kolaborasi antar lima elemen kunci pentahelix.

I.7 Kerangka Berpikir

Pemangku kepentingan memiliki peranan yang penting dalam pengembangan Desa wisata. Kurangnya kerjasama antar *stakeholder* dapat berdampak pada keberlangsungan Desa wisata tersebut. Dalam pengembangan Desa wisata tidak hanya membutuhkan dari satu peran pemangku kepentingan saja, namun dibutuhkan peran dari berbagai *stakeholder* agar dapat melakukan pengembangan Desa wisata. Adapun hambatan dalam pengembangan Desa wisata yang biasa ditemui dapat dari segi pengelola maupun segi warga pendukung setempat. Kaitannya dengan pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu , hambatan dalam pengembangan Desa wisata tersebut tidak ditemui pada BUMDes selaku pengelola wisata tersebut. Namun, berdasarkan temuan di lapangan justru yang menjadi hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu ditemui pada

warga setempat. Dimana pada saat awal proses pembangunan Desa Wisata Lontar Sewu , warga cenderung menunjukkan sikap tidak percaya akan potensi yang ada di Desa Hendrosari yakni keindahan alam dari tumubuhan pohon lontar yang tidak banyak tumbuh di daerah lainnya namun, tumbuh subur di Desa tersebut. Setelah proses pembangunan Desa Wisata Lontar Sewu sudah sepenuhnya jadi dan dibuka untuk umum, hambatan yang terlihat ialah pada tenaga kerja yang diserap berasal dari warga setempat, berdasarkan temuan di lapangan beberapa pengunjung mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan Desa Wisata Lontar Sewu .

Dalam merespon permasalahan tersebut, diperlukan bantuan dari *stakeholder* terkait untuk melakukan berbagai upaya agar dapat menciptakan solusi untuk mengidentifikasi peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat untuk dapat menyelesaikan, masalah yang ada seperti memaksimalkan kinerja pemangku kepentingan yang terlibat dan menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait fenomena peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pemikiran Nugroho et al., dengan lima peran *stakeholder* untuk mengkaji pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Berikut adalah bagan 1.7 skema kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bagan 1.7 Skema Kerangka Berpikir



Sumber: diolah peneliti (2022)

I.8 Metodologi Penelitian

W. Lawrence Neuman menyebutkan bahwa metodologi berarti memahami keseluruhan proses penelitian termasuk dalam konteks penelitian ⁹⁸. Metodologi penelitian adalah alur pemikiran secara menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretical perspective*) dalam suatu penelitian ⁹⁹. Sedangkan metode penelitian merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam penelitian yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan secara praktis maupun teoritis ¹⁰⁰. Metode penelitian secara umum didefinisikan sebagai bentuk kegiatan ilmiah yang bertahap secara logis dan rasional, seperti penentuan topik hingga menganalisis data untuk memperoleh pemahaman atas isu tertentu. Lebih lanjut, metode mengacu pada pengumpulan teknik khusus yang digunakan peneliti dalam studi untuk memilih kasus, mengukur dan mengamati kehidupan sosial, mengumpulkan dan menyaring data, menganalisis data, dan melaporkan data ¹⁰¹. Sehingga metode penelitian merupakan satu kesatuan dalam bagian metodologi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan penelitian studi kasus.

Pendekatan interpretatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada tindakan sosial yang bermakna yang terbangun secara sosial dan relativisme sosial ¹⁰². Pendekatan interpretatif dalam penelitian sosial bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang kehidupan sosial dan menemukan makna dalam fenomena tersebut ¹⁰³. Sehingga dalam penelitian ini dapat menganalisis secara terstruktur atas tindakan yang bermakna sosial melalui

⁹⁸ Lawrence Neuman, *Loc. Cit.*, hal. 2.

⁹⁹ J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana Indonesia, hal. 1.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁰¹ Lawrence Neuman, *Loc. Cit.*

¹⁰² Lawrence Neuman, *Op. Cit.*, hal. 103

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 104

pengamatan secara rinci terhadap peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Dalam pendekatan interpretatif, peneliti memiliki peranan penting untuk memberi menerjemahkan data dan informasi yang diberikan oleh informan¹⁰⁴.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala utama. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari permasalahan sosial¹⁰⁵. Dalam penelitian kualitatif menitikberatkan pada upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik, menganalisis data secara induktif serta menafsirkan makna data¹⁰⁶. Sehingga laporan akhir dalam penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif harus menggunakan cara pandang secara induktif dengan memfokuskan pada pemaknaan individu untuk memberikan penafsiran atas permasalahan yang kompleks¹⁰⁷. Dalam metode kualitatif, peneliti sering berbicara tentang pemahaman emik tentang adegan, yang berarti bahwa perilaku dijelaskan dari sudut pandang aktor dan spesifik konteks¹⁰⁸. Peneliti yang menggunakan pendekatan emik induktif dimulai dengan mengamati interaksi tertentu, kemudian membuat konsep pola umum dari pengamatan, dilanjut dengan membuat klaim tentatif, dan menarik kesimpulan yang membangun teori¹⁰⁹.

Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian secara kualitatif menjadikan proses penelitian dilakukan mulai dari melakukan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian, pembahasan atau penelusuran kepustakaan, menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan¹¹⁰. Dalam penelitian kualitatif, teori dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda,

¹⁰⁴ J. R. Raco, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Sarah J. Tracy. (2020). *Qualitative Research Methods Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact Second Edition*, Wiley Blackwell, hal. 26.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 27

¹¹⁰ J. R. Raco, *Op. Cit.*, hal. 18

seperti teori digunakan sebagai penjelasan atas perilaku, teori sebagai panduan umum dalam meneliti suatu konteks, teori sebagai poin akhir penelitian, serta tidak menggunakan teori secara eksplisit¹¹¹. Dimana dalam jenis penelitian studi kasus ini, peneliti akan memberikan deskripsi analisis yang mendalam terkait dengan suatu kasus yang mana seperti program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu atau sekumpulan orang. Adapun Creswell juga menjelaskan bahwa peneliti yang menggunakan jenis ini harus menyatukan semua data secara rinci dan detail dengan menggunakan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan¹¹². Sehingga pada dasarnya jenis penelitian studi kasus akan relevan dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu jika ditinjau dari pemetaan dan peran *stakeholder* yang terlibat.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang bagi individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan¹¹³. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dalam bentuk kata atau angka serta menyajikan terkait profil, klasifikasi atau tahapan-tahapan dalam menjawab pertanyaan siapa, kapan, dimana, dan bagaimana¹¹⁴.

Lebih lanjut, Neuman menyebutkan tujuan penelitian deskriptif,¹¹⁵ yaitu:

- a. memberikan gambaran yang detail dan sangat akurat
- b. menemukan data baru yang bertentangan dengan data sebelumnya
- c. membuat kumpulan kategori atau klasifikasi jenis
- d. memperjelas urutan langkah atau tahapan
- e. mendokumentasikan proses atau mekanisme sebab akibat

¹¹¹ John W. Creswell. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar Yogyakarta.

¹¹² Ibid., hal. 19

¹¹³ John W. Creswell, *Loc. Cit.*

¹¹⁴ Lawrence Neuman, *Op. Cit*, hal. 38.

¹¹⁵ Ibid.

- f. melaporkan latar belakang atau konteks suatu situasi

Dengan demikian, penelitian deskriptif menyajikan gambaran tentang detail spesifik dari suatu situasi, latar sosial, atau hubungan¹¹⁶. Hasil dari penelitian deskriptif yaitu sebuah gambaran rinci terkait dengan masalah dalam pertanyaan penelitian¹¹⁷. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif tipe deskriptif sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan menggambarkan terkait fenomena *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .

I.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yang ditentukan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Lokasi penelitian sangat penting karena memberikan bantuan kepada peneliti untuk menentukan dan mengambil data dan informasi yang valid. Menurut Creswell, menjelaskan dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif harus memilih dan melakukan perencanaan atau *purposefully select* dalam menentukan informan dan lokasi penelitian karena dengan demikian dapat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang ada¹¹⁸. Oleh karena itu melihat pentingnya lokasi penelitian, peneliti menentukan lokasi penelitian menggunakan purposive yang didasarkan pada pertimbangan tertentu untuk dijadikan sumber data¹¹⁹. Adapun penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik serta Desa Hendrosari. Pada dasarnya ada beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini, yaitu;

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.127, Kebomas, Randuagung, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dikarenakan dinas tersebut merupakan instansi yang terkait dengan Desa Wisata Lontar Sewu .
2. Desa Hendrosari dikarenakan Desa Hendrosari menjadi Desa yang mampu bangkit dari stigma buruk yang ditanamkan oleh warga luar, menjadi Desa

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.* hal. 39.

¹¹⁸ John W. Creswell, *Loc. Cit.*

¹¹⁹ Sugiyono, *Loc. Cit.*

yang maju karena mampu mengembangkan Desa Wisata Lontar Sewu dan mampu meningkatkan taraf hidup warga di Desa Hendrosari.

3. Desa Wisata Lontar Sewu karena menjadi salah satu Desa wisata di Kabupaten Gresik yang terpilih oleh Kemendes PDTT dalam Pogram Percontohan Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL).

I.8.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan pemilihan informan yang dilakukan berdasarkan perencanaan dan kriteria tertentu ¹²⁰. Penentuan informan dengan teknik *purposive* melalui kriteria yang relevan dengan masalah penelitian tertentu ¹²¹. Penentuan informan dilakukan dengan penilaian peneliti terhadap siapa yang dapat memberikan informasi terbaik dalam mencapai tujuan penelitian ¹²². Teknik *purposive* sangat relevan ketika tujuan penelitian ingin membangun realitas sejarah, menggambarkan fenomena, serta mengembangkan sesuatu¹²³. Teknik penentuan informan ini dianggap cocok dalam memahami permasalahan penelitian, yaitu terkait dengan peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu . Adapun beberapa informan terkait *stakeholder* yang terlibat dan dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjelaskan permasalahan ini, yaitu:

1. Bapak Abdul Hamim selaku Analis Data dan Informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Pemilihan informan dikarenakan pada saat awal mendatangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik, pihak dinas langsung merekomendasikan beliau karena dianggap paham terkait perkembangan wisata di Kabupaten Gresik.

¹²⁰ *Op. Cit.*, hal. 253.

¹²¹ Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*

Lainnya. Jakarta: Putra Grafika.

¹²² Ranjit Kumar, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (Fourth Edition)*, Sage Publication, USA, 2014, hal. 380.

¹²³ *Ibid*.

2. Bapak Fither Kuntajaya selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Pemilihan informan dikarenakan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bidang Pariwisata karena dianggap sebagai pihak yang paham akan perkembangan wisata di Kabupaten Gresik.
3. Bapak Asna Hadi Saputro selaku Kepala Desa di Desa Hendrosari. Pemilihan informan dikarenakan beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Desa maka dari itu penting untuk melakukan wawancara dengan beliau sebab mengetahui perkembangan Desa Wisata Lontar Sewu .
4. Bapak Aristoteles selaku Direktur BUMDes di Desa Hendrosari. Pemilihan informan dikarenakan beliau memiliki jabatan sebagai direktur BUMDes yang dimana Desa Wisata Lontar Sewu merupakan salah satu produk usaha dari BUMDes Hendrosari dan beliau sangat paham dengan objek wisata Lontar Sewu.
5. Bapak Abdul Kholib selaku Ketua Unit Pengelola Wisata Lontar Sewu. Pemilihan informan dikarenakan beliau lebih memahami mengenai pengelolaan Desa Wisata Lontar Sewu .
6. Bapak Arif Noveri selaku Kaur Keuangan di Desa Hendrosari dan Tim Kreatif dan Marketing Wisata Lontar Sewu. Pemilihan informan dikarenakan beliau memiliki kemampuan untuk melakukan promosi Desa Wisata Lontar Sewu .
7. Ibu Endang, Ibu Lisa, Ibu Dewi, Bapak Wito dan Bapak Arif sebagai Warga desa Hendrosari selaku Investor. Pemilihan informan dikarenakan bapak/ibu yang bersangkutan turut serta melakukan pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu dan bertempat tinggal di Desa Hendrosari.
8. Ibu Senitri, Ibu Kastin, Ibu Muntik, Ibu Ana, dan Ibu Siti sebagai Warga desa Hendrosari selaku pelaku usaha yang berjualan disekitar tempat wisata. Pemilihan informan dikarenakan pihak yang bersangkutan mendapatkan manfaat langsung dari Desa Wisata Lontar Sewu dikarenakan dapat berjualan di sekitar wisata sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian mereka.

9. Bapak Sunyoto warga desa Hendrosari, pemilik usaha bengkel sepeda motor di sekitar Desa Wisata Lontar Sewu , pemilihan informan dikarenakan beliau memiliki usaha di bidang otomotif sehingga diperlukan wawancara dengan pihak terkait.
10. Ibu Ratna warga desa Hendrosari, pemilik usaha sembako di sekitar Desa Wisata Lontar Sewu , pemilihan informan dikarenakan beliau memiliki usaha sehingga diperlukan wawancara dengan pihak terkait.
11. Ibu Sundari warga desa Hendrosari, selaku ibu rumah tangga yang memiliki tempat tinggal di sekitar Desa Wisata Lontar Sewu , pemilihan informan dikarenakan beliau bertempat tinggal di RT 08/RW 01 yang berdekatan dengan Desa Wisata Lontar Sewu .
12. Bapak Bambang warga desa Hendrosari, pemilik rumah makan di sekitar Desa Wisata Lontar Sewu , pemilihan informan dikarenakan beliau memiliki usaha sehingga diperlukan wawancara dengan pihak terkait.
13. Ibu Lasmini selaku ibu rumah tangga yang memiliki tempat tinggal di sekitar Desa Wisata Lontar Sewu , pemilihan informan dikarenakan beliau bertempat tinggal di RT 08/RW 01 yang berdekatan dengan Desa Wisata Lontar Sewu .
14. Bapak Deni dan Ibu Dian sebagai Warga desa Hendrosari selaku karyawan/pegawai wisata lontar sewu. Pemilihan informan dikarenakan bapak/ibu bekerja di Desa Wisata Lontar Sewu .

I.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual ¹²⁴. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu di lokasi penelitian¹²⁵. Dalam hal ini, peneliti merekam atau mencatat dengan cara terstruktur atau semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diajukan oleh peneliti¹²⁶. Peneliti dapat memiliki peran yang beragam¹²⁷. Penelitian ini akan menggunakan metode observasi. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi langsung ke warga dan mengamati kondisi lapangan secara langsung. Peneliti juga akan mengajukan pertanyaan kepada petugas yang sedang bertugas dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti datang ke tempat kegiatan yang akan diteliti yaitu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dan Desa Wisata Lontar Sewu. Hasil yang diharapkan dalam observasi ini, yaitu dapat mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu.

b. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara secara face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan yang sudah ditentukan. Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono, wawancara terdiri dari beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Peneliti akan melakukan wawancara secara semistruktur. Dalam wawancara ini, peneliti meminta pendapat dan ide dari

¹²⁴ Creswell, *Loc. Cit.*, hal. 253 – 257.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 254.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

informan. Tujuan dari adanya wawancara tersebut yaitu untuk menemukan permasalahan secara terbuka¹²⁸.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan *face to face interview* secara mendalam dan melakukan wawancara dengan menggunakan telepon dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan terbuka agar mendapatkan informasi yang luas mengenai persepsi atau pendapatn pihak terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dan kepada informan yang berada di Desa Wisata Lontar Sewu .

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik (seperti: koran, makalah, laporan) dan dokumen pribadi dari informan. Peneliti akan mencari dokumen yang berhubungan dengan peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu dan data-data lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Materi Audio-Visual

Data ini dapat berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara atau bunyi ¹²⁹. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data materi audio-visual. Dalam penelitian ini akan menggunakan video yang diupload oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik yang diupload melalui Instagram dan Youtube instansi terkait.

¹²⁸ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 115.

¹²⁹ Creswell, *Loc.Cit.*, hal. 255.

I.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar ¹³⁰. Pada tahap analisis data melibatkan segmentasi serta klasifikasi terhadap data serta menyusunnya kembali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan strategi induktif. Strategi induktif merupakan strategi analisis yang dituangkan pada seluruh data dengan memperhatikan pola untuk menemukan beberapa bagian dari data yang menyarankan satu atau dua konsep yang berguna sebagai dasar analisis yang lebih dalam. Strategi induktif muncul dengan memeriksa data secara cermat, bukan dari proposisi teoritis sebelumnya ¹³¹.

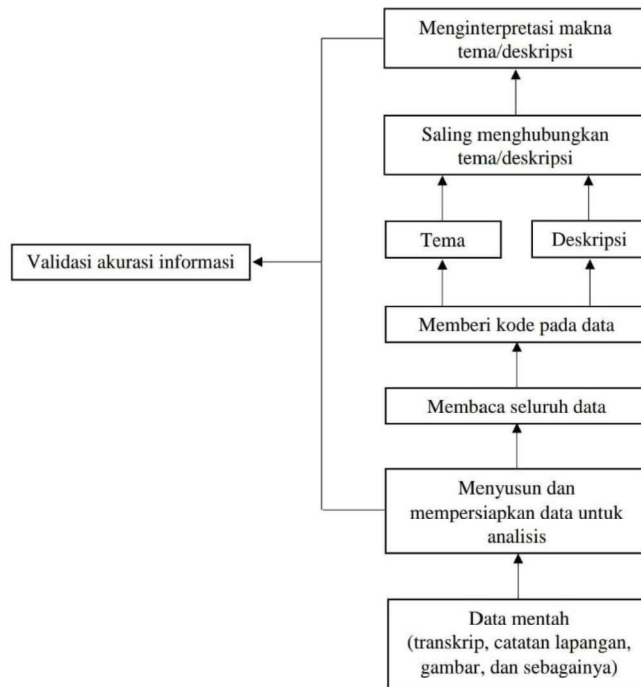
Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berlangsung bersamaan dengan bagian lain dalam pengembangan penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data dan penulisan temuan ¹³². Dengan demikian analisis data secara induktif selaras dengan analisis dalam penelitian kualitatif sebagai sebuah proses dari yang spesifik menuju ke umum pada berbagai tingkatan level analisis seperti dalam gambar 1.3 berikut ini ¹³³.

¹³⁰ Creswell, *Loc. Cit.*, hal. 260.

¹³¹ Robert K. Yin, *Loc. Cit.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ John W. Creswell, *Op. Cit.*, hal. 263.



Gambar 1.2 Analisis data dalam penelitian kualitatif

Sumber: Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran, John W. Creswell

Pada gambar 1.3 tersebut menjelaskan pendekatan secara linear dan hierarkis dari bawah ke atas, namun dalam praktiknya pendekatan tersebut dapat lebih interaktif dengan saling terhubung. Pendekatan tersebut dijelaskan lebih detail dalam beberapa langkah berikut, yaitu:

1. Langkah pertama yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Pada langkah ini melibatkan beberapa data, seperti transkrip wawancara, tinjauan materi, data yang berasal dari lapangan, atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam kategori yang berbeda tergantung berdasarkan pada sumber informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan transkrip hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik serta hasil wawancara yang diperoleh dari Desa Wisata Lontar Sewu, kemudian menyusun data yang diperoleh di lapangan berdasarkan analisis teori stakeholder kemudian dilakukan pemetaan dan klasifikasi peran *stakeholder*.

2. Langkah kedua yaitu membaca keseluruhan data. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum atas informasi yang telah diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membaca hasil yang diperoleh di lapangan yakni terkait dengan *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .
3. Langkah ketiga yaitu memulai *coding* terhadap semua data. *Coding* merupakan sebuah proses dalam mengkategorisasikan data yang dikumpulkan. Pada langkah ini mengikutsertakan proses pengambilan data tulisan dan gambar yang telah dikumpulkan selama penelitian, selanjutnya dengan labeling menggunakan istilah khusus. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan *coding* mana yang termasuk bagian dari pemetaan dan peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .
4. Langkah keempat yaitu menerapkan proses *coding* untuk menjelaskan *setting*, partisipan, kategori, dan tema yang dianalisis. Proses ini melibatkan usaha penyampaian detail informasi terkait partisipan, lokasi, maupun *setting* tertentu. Dengan demikian, peneliti dapat membuat kode-kode yang dapat digunakan untuk menjelaskan informasi yang lebih kompleks. Kemudian dalam tahapan ini peneliti akan menganalisis terkait peran *stakeholder* dan melakukan pemetaan *stakeholder* yang ada di Desa Wisata Lontar Sewu berdasarkan teori yang ada.
5. Langkah kelima yaitu menyajikan deskripsi dan tema-tema terkait dalam laporan. Dalam langkah ini lebih umum dalam menerapkan pendekatan secara naratif dalam menyampaikan laporan. Dalam langkah ini peneliti dapat menggunakan gambar, visual, maupun tabel untuk menyajikan dalam pembahasan ini. Dalam hal ini, peneliti menyajikan tabel reduksi guna memudahkan para pembaca yang ingin membaca penelitian terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah interpretasi data dalam penelitian. Interpretasi dapat berasal dari literatur terdahulu maupun teori-teori yang ada. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan dapat membenarkan atau menyanggah informasi

terdahulu. Dan kemudian setelah peneliti menganalisis secara keseluruhan langkah atau tahap selanjutnya ialah interpretasi data yang dituliskan oleh peneliti pada bab berikutnya.

I.8.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan sebuah validitas atau keabsahan terhadap data. Validitas atau keabsahan dalam kualitatif merupakan cara memeriksa ketepatan hasil penelitian melalui prosedur tertentu sehingga hasilnya mengindikasikan konsistensi pendekatan yang digunakan oleh peneliti baik dalam sudut pandang peneliti, partisipan, maupun pembaca¹³⁴. Teknik triangulasi data digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini. Penggunaan triangulasi data dalam penelitian ini dengan memeriksa data dengan sumber data yang dapat digunakan sebagai justifikasi tema secara terpadu¹³⁵. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu dilakukan dengan memeriksa bukti dari sumber data kemudian memanfaatkannya untuk membuat justifikasi tema (Creswell, 2014). Keabsahan data dalam penelitian ini dapat dicapai dengan melakukan:

- a. Perbandingan hasil wawancara dengan hasil pengamatan

Peneliti membandingkan hasil wawancara pada berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam hal ini ialah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, BUMDes Hendrosari, kelompok warga selaku tenaga kerja, pelaku usaha UKM dan investor dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu dengan hasil pengamatan secara langsung di lapangan.

- b. Perbandingan hasil wawancara dengan dokumen

Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung yang relevan. Dalam hal ini, yang dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan segala bentuk dokumen yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan obyek penelitian.

¹³⁴ John W. Creswell, *Op. Cit.*, hal. 269.

¹³⁵ *Ibid.*

c. Perbandingan hasil wawancara dari informan yang berbeda

Adapun dengan ini, peneliti membandingkan antara informasi yang didapatkan dari satu informan dengan informan yang lain terkait dengan obyek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu .